

SKRIPSI
MANAJEMEN KOLABORATIF DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA
DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
MELALUI PROGRAM *CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

LAILATUL RAHMA

D93216053

Dosen Pendamping :

Dr. Hanun Asrohah, M. Ag. / 196804101995032002

Ali Mustofa, M. Pd. / 197612252005011008

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LAILATUL RAHMA

NIM : D93216053

JUDUL : MANAJEMEN KOLABORATIF DINAS SOSIAL KOTA
SURABAYA DAN UIN SUNAN AMPEL MELALUI PROGRAM
CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 17 Juni 2020

Yang Menyatakan,



LAILATUL RAHMA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

NAMA : LAILATUL RAHMA

NIM : D93216053

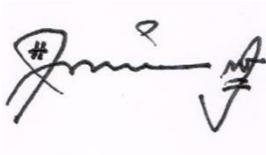
JUDUL : MANAJEMEN KOLABORATIF DINAS SOSIAL KOTA
SURABAYA DAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA MELALUI PROGRAM
CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 17 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hanun Asrohah , M.Ag
NIP. 196804101995032002



Ali Mustofa, M.Pd
NIP. 197162252005011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Lailatul Rahma ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 17 Juni 2020

Mengesahkan



H. Ali Mas'ud, M.Ag., M.Pd.I

NIP.196301231993031002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Imam Bawan

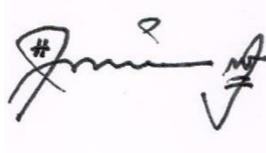
NIP.195208121980031006

Penguji II,

Dr. Arif Mansyuri, M.Pd.I

NIP. 197903302014111001

Penguji III,

A handwritten signature in black ink on a light pink background. The signature is stylized and appears to be 'Hanun Asrohah'.

Dr. Hanun Asrohah , M.Ag
NIP. 196804101995032002

Penguji IV,

A handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Ali Mustofa'.

Ali Mustofa, M.Pd
NIP. 197162252005011008

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUL BAHMA
NIM : D93216053
Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN KEGURUAN/ PENDIDIKAN ISLAM
E-mail address : lailatulrahma1212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**MANAJEMEN KOLABORATIF DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MELALUI
PROGRAM CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2020

Penulis

Lailatul Rahma

ABSTRAK

Lailatul Rahma (D93216053), Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Program Campus Social Responsibility, Dosen Pembimbing I Dr. Hanun Asrohah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ali Mustofa, M.Pd.

Manajemen kolaboratif adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan PMKS pada anak di Kota Surabaya. Manajemen kolaboratif (*co-management* atau *collaborative management*), sering disebut sebagai *participatory management*, *shared management*, *multi-stakeholder management* adalah bentuk pengelolaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan mekanisme kerjasama, yang didorong oleh pengakuan hak pada setiap pihak, dalam rangka mencapai tujuan manajemen, secara bersama. Dalam bidang pendidikan, kota Surabaya hadir sebagai kota yang responsif terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh anak melalui program CSR (*Campus Social Responsibility*). CSR ialah kegiatan yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dan bekerjasama dengan perguruan tinggi salah satunya adalah UINSA melalui mahasiswanya untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada anak putus sekolah dan rentan putus sekolah dimana satu orang mahasiswa diberikan tugas untuk mendampingi satu orang adik asuh. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Melalui Program *Campus Social Responsibility*, (2) Mengetahui dan mendeskripsikan strategi manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui program *Campus Social Responsibility* dalam bidang pendidikan di Kota Surabaya (3) Mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Melalui Program *Campus Social Responsibility*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsetaan, ketekunan pengamatan, triangulasi (*sumber*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1): pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui langkah-langkah meliputi : a) *preparing for the partnership* dengan melakukan observasi untuk menemukan mitra kerja, b) *developing the agreement* atau mengembangkan perjanjian yang dimulai dari membuat MoU dan SOP sebagai upaya tindak lanjut, c) *Implementing and reviewing the agreement* atau meninjau perjanjian dengan pembentukan SATGAS untuk mengevaluasi kinerja pendampingan. (2) strategi manajemen kolaboratif melalui program *Campus Social Responsibility* yaitu : a) koordinasi dengan menggunakan *google form*, b) proses integrasi dengan berpedoman pada MoU dan SOP untuk menghindari *double job*, c) sinkronisasi, menggunakan *google form* dan pembentukan SATGAS, d) simplifikasi, dengan membuat *schedule of event*. (3) faktor-faktor pendukung: 1) pemilihan mitra kerja yang tepat, b). penggunaan teknologi, c) pembentukan SATGAS mempermudah proses pendampingan. 4) Fakto penghambat: Rasio antara dosen pendamping dan mahasiswa tidak relevan.

Kata Kunci: Manajemen Kolaboratif, Program *Campus Social Responsibility*

DAFTAR ISI

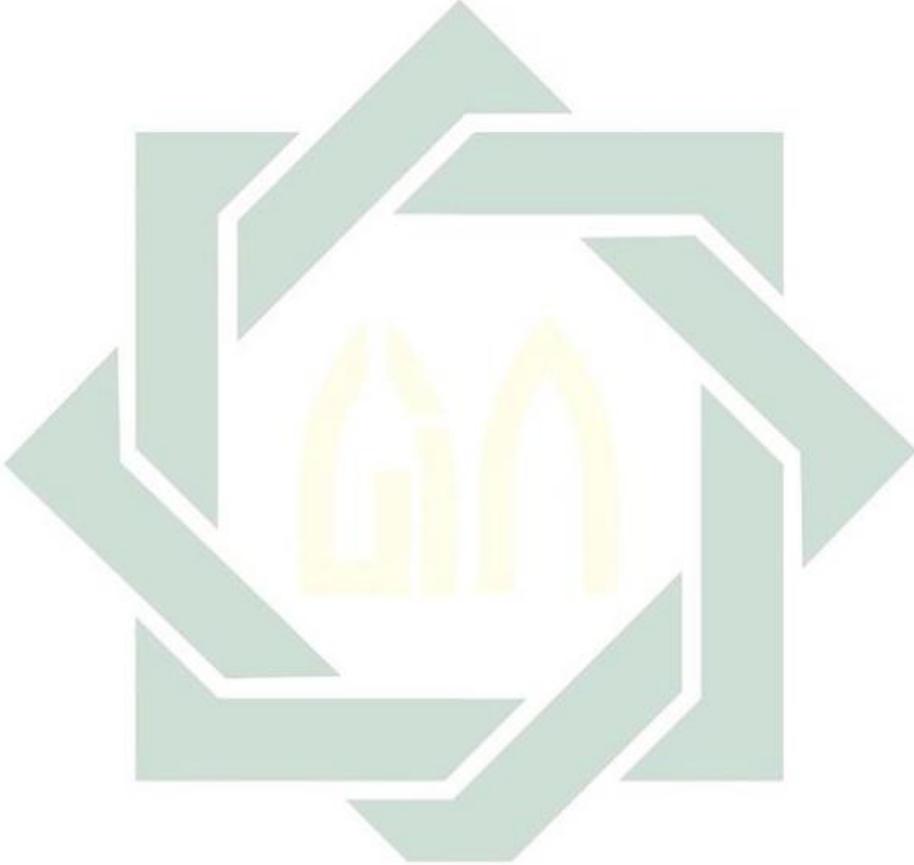
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1

B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Konseptual	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Manajemen Kolaboratif.....	13
1. Pengertian Manajemen Kolaboratif	13
2. Model-Model Manajemen Kolaboratif	17
3. Prinsip-prinsip Manajemen Kolaboratif.....	20
4. Possible Phases/ Steps in Collaborative Management Process.....	22
B. Campus Social Responsibility	24
1. Pengertian Program Campus Social Responsibility.....	24
2. Dasar hukum pelaksanaan <i>Campus Social Responsibility</i>	25
3. Tujuan Program <i>Campus Social Responsibility</i>	26
4. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Campus Social Responsibility	28
5. Sasaran <i>Campus Social Responsibility</i>	29

6. Teknis Pendampingan <i>Campus Social Responsibility</i>	29
C. Keterkaitan Manajemen Kolaboratif dan <i>Campus Social Responsibility</i>	34
BAB III.....	36
METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Prosedur Analisis Data dan Interpretasi Data.....	43
F. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV.....	47
HASIL PENELITIAN	47
A. Profil Umum Objek Penelitian.....	47
1. Dinas Sosial Kota Surabaya.....	47
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)	49
B. Deskripsi Hasil Penelitian Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya Dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i>.	56
1. Langkah-langkah manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i>	56

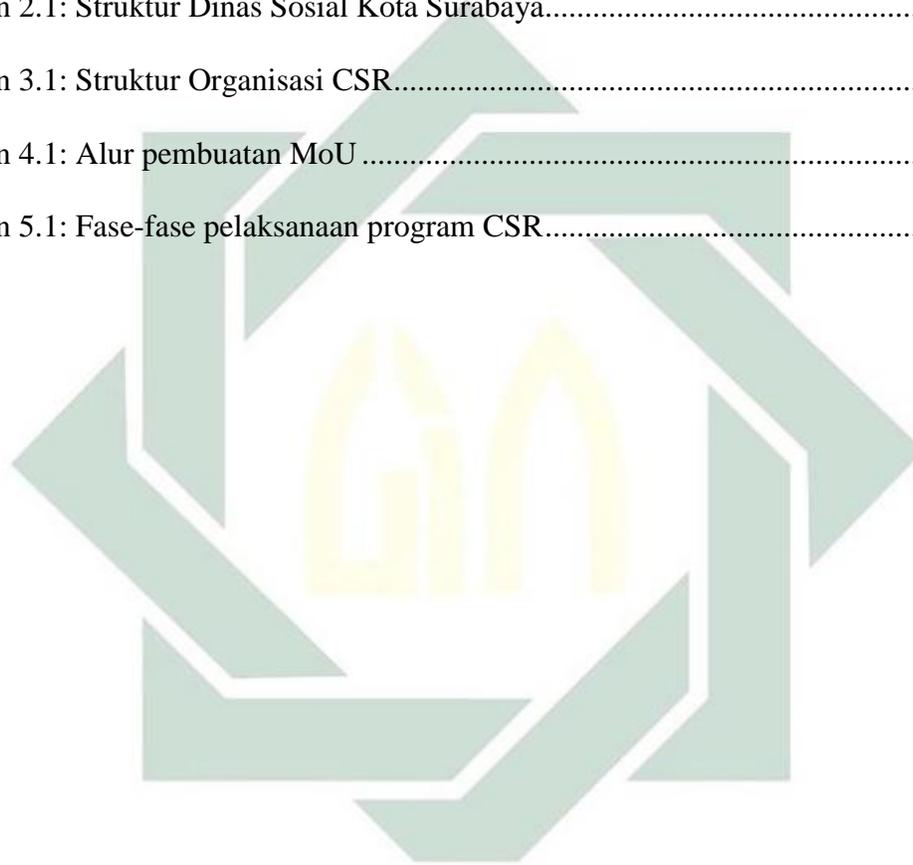
2. Strategi Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i> dalam Bidang Pendidikan di Kota Surabaya.....	84
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i>	92
C. Analisis Hasil Penelitian.....	98
1. Analisis Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i>	98
2. Analisis Strategi Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i> dalam Bidang Pendidikan di Kota Surabaya.....	103
3. Analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program <i>Campus Social Responsibility</i>	106
BAB V.....	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.



DAFTAR BAGAN

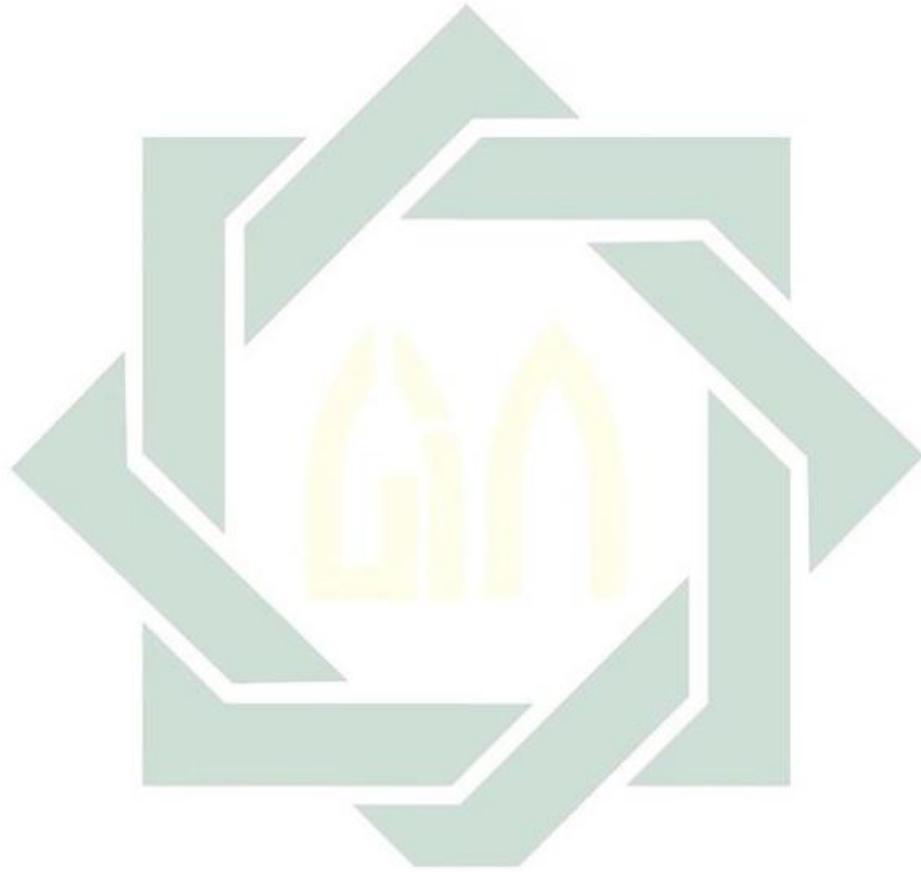
Bagan 1.1: Langkah-langkah pelaksanaan manajemen kolaboratif.....	23
Bagan 2.1: Struktur Dinas Sosial Kota Surabaya.....	49
Bagan 3.1: Struktur Organisasi CSR.....	61
Bagan 4.1: Alur pembuatan MoU.....	68
Bagan 5.1: Fase-fase pelaksanaan program CSR.....	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik I

: Angka Permasalahan Sosial Pada Anak 2013-2019



DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Indikator Kebutuhan Data Observasi	38
Tabel 1.2	Indikator Data Kebutuhan Wawancara	40
Tabel 1.3	Indikator Data Kebutuhan Dokumentasi	41
Tabel 2.1	Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya	45
Tabel 2.2	Luas Lahan UINSA	49
Tabel 3.1	Wilayah Pendampingan Mahasiswa UINSA Tahun 2019	57
Tabel 3.2	Tupoksi Tim Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Program CSR	60
Tabel 4.1	Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan Bulan Agustus 2019	74

Tabel 4.2	Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan Bulan September 2019	75
Tabel 4.3	Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan Bulan Oktober 2019	75
Tabel 4.4	Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan Bulan November 2019	76
Tabel 4.5	Prestasi UINSA Pada Youth Competition	80
Tabel 5.1	Tahapan dan Jadwal Kegiatan CSR Tahun 2020	82
Tabel 6.1	Faktor Pendukung pelaksanaan Manajemen Kolaboratif	105
Tabel 6.2	Faktor Penghambat pelaksanaan Manajemen Kolaboratif	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara, Pedoman Dokumentasi
- Lampiran II : Foto Transkrip Email Dinas Sosial Kota Surabaya
- Lampiran III : Foto Transkrip Email UINSA Surabaya
- Lampiran IV : Foto Sesi Interview
- Lampiran V : Foto Saat Gathering dan Sosialisasi CSR 2019
- Lampiran VI : Foto Mahasiswa UINSA Pada Youth Competition 2019
- Lampiran VII : Foto Rapat Koordinasi Dosen Pendamping dan Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah terbesar setiap kota bahkan negara adalah masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Permasalahan PMKS meliputi : Anak terabaikan atau terlantar, anak bermasalah dengan kasus hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar setelah Jakarta yang juga memiliki permasalahan PMKS. Permasalahan anak yang termasuk dalam PMKS pada tahun 2019 tercatat sebanyak 530 anak.¹ Tentunya, permasalahan tersebut akan berdampak pada setiap bidang kehidupan. Contohnya adalah kasus anak terlantar yang mendapatkan pengabaian dari orang tua akan berdampak pada pendidikan anak tersebut. Anak terlantar juga akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Pergaulan yang bebas dan juga kecanggihan teknologi turut serta memberikan sumbangsi untuk mendorong anak melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum yang akhirnya, menambah jumlah tingkat kriminalitas. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur dalam hasil Operasi Ketupat Semeru tercatat bahwa angka kriminalitas meningkat sebanyak

¹ Data diolah dari Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2019

96%². Artinya, anak yang terlantar akan berpeluang besar menambah daftar hitam angka kriminalitas di Jawa Timur. Selain itu, data mengenai anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di Kota Surabaya juga menunjukkan angka yang pasang surut dari tahun 2013 hingga 2019 sebagai berikut :



Grafik 1. Angka Permasalahan Sosial pada Anak

Terlihat bahwa permasalahan sosial pada anak tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 1.117 anak. Selama tahun 2013 hingga 2017 terjadi kenaikan sebanyak 43% dan pada tahun 2019 angka permasalahan sosial pada anak mengalami penurunan sebesar 47% atau 530 anak.

Dalam hal ini, tentunya pemerintah dan segala pihak tidak terkecuali perguruan tinggi juga ikut serta sebagai relawan masa depan yang harus bersinergi memberikan dukungan terhadap permasalahan dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas untuk mendukung angka partisipasi melanjutkan pendidikan. Sehingga, perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang hanya berdiri sebagai simbol pendidikan

² Tingkat Kriminalitas di Jatim, <https://www.tagar.id/tingkat-kriminalitas-di-jatim-meningkat-96-persen>, diakses 12 Desember 2019

tertinggi tetapi, juga adalah bagian dari keikutsertaan mendukung perubahan menjadi lebih baik seperti yang terdapat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Manajemen kolaboratif adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan PMKS pada anak di Kota Surabaya. Manajemen kolaboratif (*co-management* atau *collaborative management*), sering disebut sebagai *participatory management*, *shared management*, *multi-stakeholder management* adalah bentuk pengelolaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan mekanisme kerjasama, yang didorong oleh pengakuan hak pada setiap pihak, dalam rangka mencapai tujuan manajemen, secara bersama.³

Dalam bidang pendidikan, kota Surabaya hadir sebagai kota yang responsif terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh anak melalui program CSR (*Campus Social Responsibility*). CSR ialah kegiatan yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dan bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada anak putus sekolah dan rentan putus sekolah dimana satu orang mahasiswa diberikan tugas untuk mendampingi satu orang adik asuh.

³ Roni Bawole dkk, Manajemen Kolaboratif dalam Tata Kelola Zona Pemanfaatan Tradisional Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Jurnal Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Vol.1 No.1 oktober 2012, 73, di akses 23 November 2019, <https://www.researchgate.net/publication/291336150>

Pendidikan adalah satu-satunya solusi terbaik untuk memberikan kesempatan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menjadi lebih baik, baik itu pendidikan formal, informal dan non-formal. Pendidikan akan merubah pola pikir dan tingkah laku anak menjadi lebih dan berorientasi pada masa depan. Bentuk pendampingan yang dilakukan diharapkan mampu terjalin proses *transfer of knowledge* dari kakak pendamping (mahasiswa) kepada adik asuh. Sehingga, akan merubah tingkah laku dan cara memandang masa depan melalui pendidikan. Mengembalikan anak bermasalah sosial untuk bersekolah adalah program pemerintah satu-satunya yang ada di Indonesia dan kemudian diterapkan di Surabaya.

Salah satu perguruan tinggi yang juga ikut serta dalam program *campus social responsibility* adalah UINSA. Dalam pelaksanaannya, UINSA telah menunjukkan respon positif dalam mendukung pendidikan dan penanggulangan masalah PMKS pada anak di Kota Surabaya. UINSA tercatat telah aktif menjadi bagian CSR selama 5 tahun lamanya dan juga sukses mendapatkan gelar sebagai kampus terbaik dalam pelaksanaan CSR (*campus social responsibility*).

Inti dari penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen kolaboratif. Manajemen kolaboratif pada umumnya digunakan para peneliti lain untuk memberikan gambaran pengelolaan sumber daya alam seperti: pengelolaan hutan dan pariwisata. Adapun dalam bidang pendidikan lebih terfokus pada pembelajaran seperti manajemen kolaboratif antara guru. Selama ini pula, manajemen kolaboratif yang telah dilaksanakan menuai banyak problematika

dan jauh dari ekspektasi yang diharapkan karena kurangnya koordinasi antar pihak yang disebabkan oleh ketidakpahaman akan tugas, fungsi dan wewenang yang dilimpahkan. Tentunya, hal ini menyebabkan tujuan yang ditetapkan hanya berjalan ditempat dan hubungan kerjasama hanyalah sebatas formalitas belaka.

Melihat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti hadir untuk mengetahui pelaksanaan **Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melalui Program *Campus Social Responsibility***. Dalam sisi yang berbeda peneliti berusaha memberikan gambaran pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* pada bidang pendidikan. Dimana salah satu latar belakang tujuan Program *Campus Social Responsibility* adalah menekan angka anak putus sekolah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini terfokus pada pelaksanaan Manajemen Kolaboratif yang di uraikan dalam pernyataan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Melalui Program *Campus Social Responsibility* ?

2. Bagaimana strategi pelaksanaan manajemen kolaboratif antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility* dalam bidang pendidikan di Kota Surabaya?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Melalui Program *Campus Social Responsibility*
2. Mengetahui dan mendeskripsikan strategi Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui program *Campus Social Responsibility* dalam bidang pendidikan di Kota Surabaya
3. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Melalui Program *Campus Social Responsibility*

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, peneliti juga mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:

a) Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan praktik mengenai manajemen kolaboratif dalam bidang pendidikan yang diterapkan di Kota Surabaya.

b) Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini mampu menjadi bahan tambahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan data mengenai manajemen kolaboratif dalam pendidikan, diantaranya:

a. Bagi Perguruan tinggi (UINSA)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan evaluasi terkait pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui Program *Campus Social Responsibility*.

b. Bagi Dinas Sosial Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan evaluasi terhadap inovasi-inovasi pemecahan masalah kesejahteraan sosial pada anak khususnya dalam hal pendidikan.

c. Bagi Peneliti lainnya

Diharapkan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen kolaboratif bisa berinovasi, bereksperimen atau bahkan menemukan hal baru dalam hal kerjasama yang terbilang efektif bagi dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan islam.

E. Defenisi Konseptual

1. Manajemen Kolaboratif

Management kolaboratif (*collaborative management or co-management*), juga dikenal sebagai *participatory management, shared management, multi-stakeholder management* adalah bentuk pengelolaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan mekanisme kerjasama, yang didorong oleh pengakuan hak pada setiap pihak, dalam rangka mencapai tujuan manajemen, secara bersama.⁴

2. Campus Social Responsibility

Campus Social Responsibility adalah sebuah usaha untuk mengembalikan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial agar kembali menempuh pendidikan. Baik dalam pendidikan formal, informal dan non-formal. Program ini melibatkan pegiat akademik di perguruan tinggi yaitu mahasiswa sebagai kakak pendamping dan Dinas Sosial Kota Surabaya.⁵

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan pendelitian yang akan dilakukan :

⁴ Roni Bawole dkk, "Manajemen Kolaboratif dalam Tata Kelola Zona Pemanfaatan Tradisional". Jurnal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 1 No.1 (October 2012): 73, di akses 6 Desember 2019, <https://www.researchgate.net/publication/291336150>

⁵ Data Dinas Sosial Kota Surabaya hal.3

1. Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Citalahab Sentral - Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat) oleh Wulandari. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan manajemen kolaborasi telah sampai pada tahap melaksanakan kesepakatan. Namun, hambatan yang dialami adalah tidak adanya kegiatan tindak lanjut atau mereview kesepakatan yang telah terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kampung Citalahab Sentral - Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini terfokus pada pengelolaan ekowisata sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA.
2. Manajemen Kolaboratif Guru Bidang Studi dan Guru Bimbingan Konseling dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Siswa pada SMA Muhammadiyah Kasongan oleh Siti Patimah. Dalam tesis yang diteliti oleh Siti Patimah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Kasongan telah melaksanakan perannya sebagai pendidik, manajer,

administrator, *supervisor*, *leader*, inovator dan motivator. Selain itu, kepala sekolah SMA Muhammadiyah Kasongan juga telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru dan sumber daya yang ada. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut kepala sekolah menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi sekolah di masa mendatang. Penelitian yang dilakukan Siti Patimah terfokus pada peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sumber daya yang ada. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada upaya pemecahan masalah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan menggunakan konsep manajemen kolaboratif melalui Program *Campus Social Responsibility*.

3. Implementasi Program *Campus Social Responsibility* Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus di UINSA) oleh Imroah. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diteliti oleh Imroah menjelaskan bahwa implementasi program *Campus Social Responsibility* meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi program *Campus Social Responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Imroah dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu mengambil program *campus social responsibility* sebagai objek penelitian. Titik perbedaan dari penelitian yang dilakukan imroah dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian imroah terfokus pada pelaksanaan program CSR di UINSA, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan adalah untuk mengetahui peran dan proses manajemen kolaboratif antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA dalam program *Campus Social Responsibility*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjabaran dalam skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari kajian pustaka yang membahas penelitian terdahulu yang relevan oleh peneliti lain serta kajian teori mengenai teori-teori yang menjadi variabel penelitian diantaranya adalah manajemen kolaboratif dan program *campus social responsibility*.

BAB III Metode Penelitian

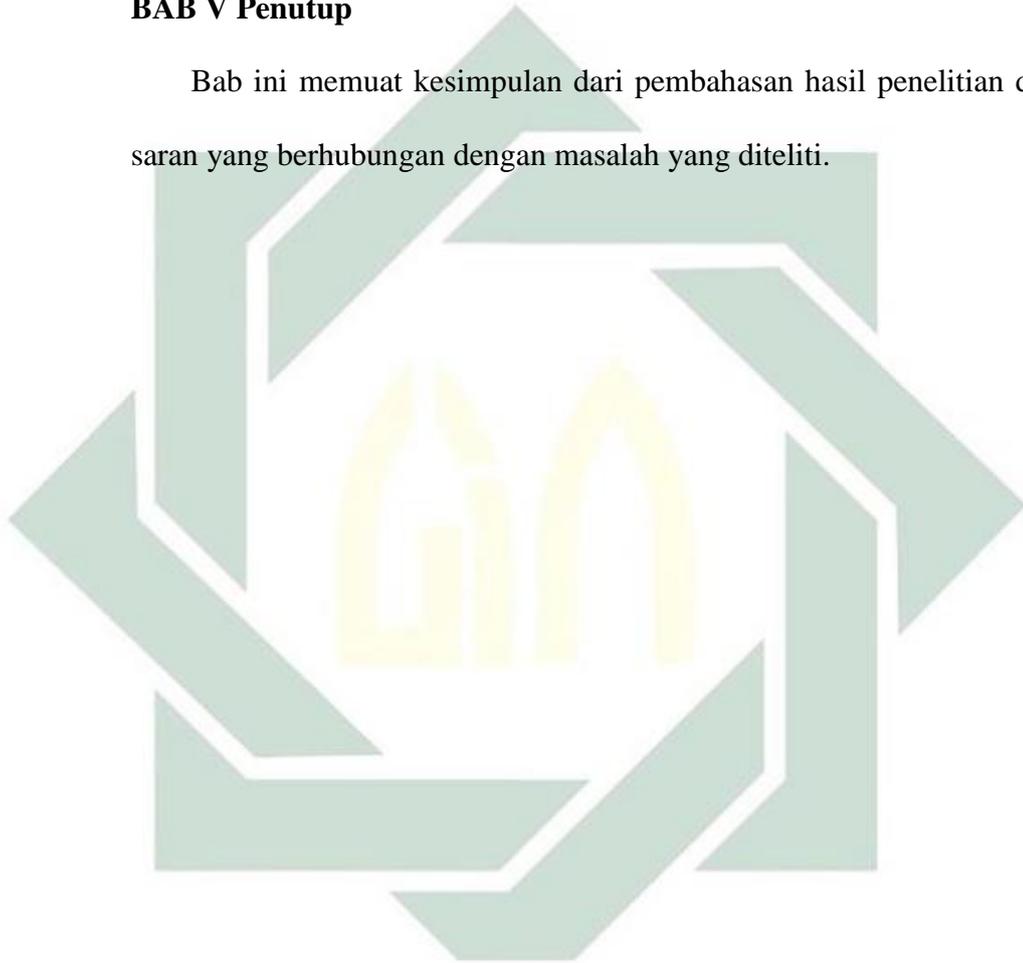
Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk meneliti diantaranya variabel dan definisi operasional, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan berisi uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga akan berisi tentang deskripsi umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Kolaboratif

1. Pengertian Manajemen Kolaboratif

Manajemen berasal dari kata *to manage*. Dalam buku *Webster's New Coolegiate Dictionary*, kata *manage* dijelaskan berasal dari bahasa Itali yaitu "*managio*" dari kata "*managgiere*" yang kemudian kata tersebut berasal dari bahasa latin "*manus*" yang berarti tangan.⁶ Sedangkan menurut George R. Terry menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang melibatkan pengarahan sebuah kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang nyata.⁷ Maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses kerangka kerja yang melibatkan sekelompok orang dengan menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, kolaboratif berasal dari bahasa Inggris yaitu *collaborative* yang artinya bekerjasama atau berkelompok.⁸ Dalam penggunaan tata bahasa Indonesia kolaboratif memiliki arti yang sama dengan kolaborasi. Kolaborasi menurut Abdulysyani merupakan bentuk proses sosial yang terdapat kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan

⁶ Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung ; Rajawali Pres 1992) hal.1

⁷ George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta : Bumi Aksara 1996) hal,1

⁸ Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2006) hal.173.

bersama dan saling memahami peran masing-masing.⁹ Kata *collaboration* dikembangkan pada abad ke-19 akibat dari berkembangnya industrialisasi, organisasi yang semakin kompleks dan pembagaaian kerja dan tugas yang meningkat.¹⁰ Kolaboratif identik dengan proses kerjasama dengan pihak lain. Pentingnya kolaboratif menurut Johnson, Kast dan Rosenzweig bahwa kolaboratif sebagai solusi dalam melaksanakan kebijakan program dalam sebuah organisasi.¹¹ Artinya, kolaboratif adalah proses yang unik dimana dalam kegiatannya tidak dapat berdiri sendiri (independen) untuk mencapai tujuan dengan peran yang berbeda.

As-Saff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Dalam ayat tersebut menerangkan tentang perintah atau seruan untuk bekerjasama antar manusia dalam kebaikan serta mencapai tujuan. Dengan bekerjasama maka pekerjaan yang berat terasa ringan dan semakin menguatkan antara kepercayaan satu pihak dengan lainnya.

⁹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 156.

¹⁰ O'flynn and Wanna, *Collaborative Governance: A New Era Public Policy In Australia?*, (ANU-E Press The Autsralian National University 2008), hal.32

¹¹ Johnson, Richard A., Kast, Fremont dan James E. Rosenzweig. 2002. *Organization and Management (Organisasi & Manajemen)* Jilid 1. Terjemahan A. Hasymi Ali, Bumi Aksara, Jakarta.

Management kolaboratif (*collaborative management or co-management*), juga dikenal sebagai *participatory management, shared management, multi-stakeholder management* adalah bentuk pengelolaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan mekanisme kerjasama, yang didorong oleh pengakuan hak pada setiap pihak, dalam rangka mencapai tujuan manajemen, secara bersama.¹²

Manajemen partisipatif atau manajemen kolaboratif, pada kenyataannya, adalah ide lama. Pelopor di bidang ini adalah Frederick Taylor, seorang insinyur pada tahun 1800-an. Bahkan, ia dikenal sebagai "Bapak manajemen ilmiah." Pendekatan Taylor adalah untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan merancang "*One Best Way*". Filosofi manajemen Taylor adalah dipengaruhi oleh empat prinsip dasar. Pertama, kembangkan pekerjaan yang efisien; kedua, mengurangi solder, istilah yang digunakan untuk menggambarkan permainan kuda, dan ketiga, sikap mental yang baik terhadap pekerjaan dan keempat, kerja sama manajemen pekerja. Tiga kontributor utama untuk pengembangan manajemen ilmiah adalah Frank, dan istrinya Lillian Gillberth, Harry Gantt dan Harrington Emerson.¹³

Penelitian mengenai manajemen kolaborasi ini sering digunakan dalam penelitian pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan,

¹² Roni Bawole dkk, "Manajemen Kolaboratif dalam Tata Kelola Zona Pemanfaatan Tradisional". *Jurnal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, 1 No.1 (October 2012): 73, di akses 6 Desember 2019, <https://www.researchgate.net/publication/291336150>

¹³ Manajemen Kolaboratif dalam Rangka Resolusi Konflik di Taman Nasional Kelimutu, Institut Pertanian Bogor.

pariwisata, kebijakan pemerintah dan juga dalam bidang pendidikan yang mengambil fokus penelitian pada proses pembelajaran. Namun, dengan berjalannya waktu menurut Chris Huxham and Siv Vangen dalam Outi Kanste mengatakan bahwa :

Use the term collaboration to refer to any situation in which people are working across organizational boundaries toward some positive end¹⁴ dan Collaborative management is not a new approach. Partnerships for resources management exist in various forms in many countries¹⁵ and many professionals involved in protected area management are aware of their potential and limitations.¹⁶

Dimana kesimpulan pada pernyataan ini ialah menerangkan bahwa penggunaan konsep kolaborasi tidak terbatas dalam situasi atau kondisi apapun.

¹⁴ Outi Kanste et al. "The Collaboration Management and Employee Views of Work and Skills in Services for Children and Families in Finish Municipalities", *Nordic Journal of Working Life Studies* 6, no.6 (March 2016):63.

¹⁵ McNeely, For a Recent of Principles and Practices of Partnerships, (_____:1995), hal.29

¹⁶ Ibid, hal,30

2. Model-Model Manajemen Kolaboratif

Model manajemen kolaboratif menurut Agranoff and McGuire beberapa model manajemen kolaboratif yaitu:¹⁷

a. *Jurisdiction-Based Management Model*

Jurisdiction-Based Management Model yaitu model yang menekankan pada kepala daerah atau pimpinan utama dalam sebuah lembaga untuk mengambil tindakan yang sifatnya strategis dengan beberapa actor dan lembaga dari berbagai pemerintah dan sector. Model ini menggambarkan bahwa kepala daerah didorong oleh strategi yang bersifat rasional, sebagai model yang berbasis yuridiksi. Untuk kepala daerah seperti itu, pencapaian tujuan lokal dan penyelesaian tugas tertentu adalah hal yang terpenting. Langkah strategis yang dilakukan dalam kompleksitas seperti itu, ketergantungan antara pemimpin lembaga yang berbasis yuridiksi dimana para pemimpin mencari dan menghubungi para actor yang memiliki sumber daya dan kemampuan (termasuk hukum, pendanaan, organisasi, keahlian dan informasi) untuk mencapai tujuan mereka.¹⁸

b. *Abstinence Model*

Abstinence Model menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk menjauhkan diri dari kolaborasi. Mereka dapat memilih untuk tidak ikut

¹⁷ Robert Agranoff and Michel Mc Guire, *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government* dalam Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Layanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu 2015) hal.35

¹⁸ Ibid, hal.35

terlibat dalam segala program dari pemerintah terutama sifatnya yang tidak wajib, sebagai suatu kebijakan internal. Dalam operasionalnya, model ini menghindari keterlibatan karena sejumlah alasan.

Beberapa faktor yang menyebabkan kolaborasi *abstinence* yaitu: beberapa wilayah keberatan dengan keterlibatan tingkatan dari pemerintah lain dalam ruang politik dan pemerintahan. Mereka ingin menghindari gangguan dokumen yang berlebihan atau prosedur aturan yang meberatkan atau menjatuhkan sanksi. Kedua, kekurangan sumber daya untuk berkolaborasi, termasuk waktu yang diperlukan untuk mengatur sumber daya. Termasuk kekurangan kemampuan personalia untuk memainkan peran, negoisasi, melaksanakan program dan pelaporan. Ketiga, beberapa pemerintah tidak berkolaborasi secara vertical maupun horizontal karena memang tidak dilibatkan.¹⁹

c. *Top-down Model*

Top-down Model merupakan keputusan dinamis birokrasi tentang bagaimana mencapai sasaran atau target dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui tindakan pemerintah lain. Solusinya adalah pemerintah menggunakan instrument melalui badan-badan untuk mengelola dengan melaksanakan atau melakukan koordinasi. Aspek utama dari *Top-down Model* adalah kepatuhan pemerintah lokal.²⁰

¹⁹ Ibid, hal.35

²⁰ Ibid, hal.36

d. *Donor-Receipt Model*

Donor-Receipt Model melibatkan penerima bantuan dan pemberi bantuan yang berdasarkan pada keterlibatan actor dalam sistem kolaboratif yang saling tergantung satu sama lain melalui *control system* yang dijalankan. Landasan empiris untuk model manajemen sebagian besar berasal dari implementasi kebijakan yang telah melihat unsur-unsur partisipasi. Implementasi kebijakan ini dipahami sebagai suatu proses interaksi atau perihal yang berhubungan dengan administrasi yang menetapkan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut model *donor-receipt*, manajer penerima sering mencari beberapa perubahan yang diinginkan untuk yurisdiksi. Beberapa tindakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sesuini ai sumber daya yang dimiliki. Tetapi, semua kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan dengan tujuan yang diinginkan untuk yurisdiksi.²¹

e. *Reactive Model*

Reactive Model menggunakan pendekatan, *maybe not*. Terkadang memilih untuk berpartisipasi, terkadang memilih untuk tidak berpartisipasi. Keputusan untuk berpartisipasi mungkin strategis, mungkin tidak. Ada beberapa alasan strategis mengapa tidak mau berkolaborasi. Pertama, prinsip otonomi dan integritas yurisdiksi sebagai

²¹ Ibid, hal.36

sebuah entitas dengan batas-batas untuk menghasilkan keputusan berdasarkan preferensi warga negara, bukan dikte atau mandate dari pemerintah pusat. Kedua, yaitu alasan dikotomi politik *administration politic*. Ketiga, kegiatan tersebut tidak didorong oleh misi dalam hal layanan dasar dianggap menjadi tidak penting. Keempat, alasan beberapa lembaga atau organisasi lainnya sudah menyediakan layanan tersebut.²²

f. *Contented Model*

Contented model lebih terfokus pada konsep strategi kolaborasi jika dibandingkan dengan aktivitas kolaborasi. Artinya, model ini memiliki sifat opportunistic dan berusaha untuk melakukan eksploitasi lingkungan sesuai dengan preferensi pemerintah lokal atau organisasi tersebut. Kolaborasi biasanya dilakukan dengan organisasi lain terkait kebijakan pembangunan yang mempengaruhi pemerintah lokal. Sehingga mekanisme aktivitas kolaborasi lebih dilakukan secara horizontal daripada aktivitas vertikal.²³

3. Prinsip-prinsip Manajemen Kolaboratif

Menurut Johnson et.al dalam Dahlan mengatakan bahwa ada 4 (empat) prinsip manajemen kolaborasi menuju kondisi ideal yaitu:²⁴

²² Ibid, hal.36

²³ Ibid, hal.37.

²⁴ Johnson, Richard A., Kast, Fremont dan James E. Rosenzweig. *Organization and Management (Organisasi & Manajemen)* dalam *Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan di*

a. Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan organisasi yang memungkinkan individu untuk mewujudkan kinerja kolektif. mekanisme koordinasi adalah “elemen paling mendasar dari struktur organisasi tersebut”. Dalam organisasi mencakup unsur-unsur formal. Dalam literatur, pengaturan organisasi ini sering melibatkan alat, teknologi, atau interaksi yang menyatukan unsur-unsur yang saling bergantung.

b. Integrasi.

Integrasi merupakan usaha yang bertujuan untuk menyatukan tindakan-tindakan dari berbagai pihak untuk mendapatkan kesepakatan dan langkah yang terarah. Dalam hal ini output yang dihasilkan dalam kesepakatan tersebut ialah SOP (*Standar Operating Procedure*).

c. Sinkronisasi.

Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyesuaikan segala bentuk aktivitas sehingga memperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas. Dengan spesialisasi kerja atau fungsi akan memberikan petunjuk apakah pekerjaan telah terlaksana dengan baik atau tidak. Adanya sinkronisasi akan meminimalisir pekerjaan ganda. Artinya, pekerjaan tidak akan tumpang tindih serta pihak yang bersangkutan tidak akan mengalami kesesatan dalam bertindak.

Kota Makassar, Dahlan dan Muh.Darwis, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, 4, no.1, 2017 hal. 23 diakses 9 Desember 2019 pada <https://ojs.unm.ac.id/index.php/administrare/article/view/3445>.

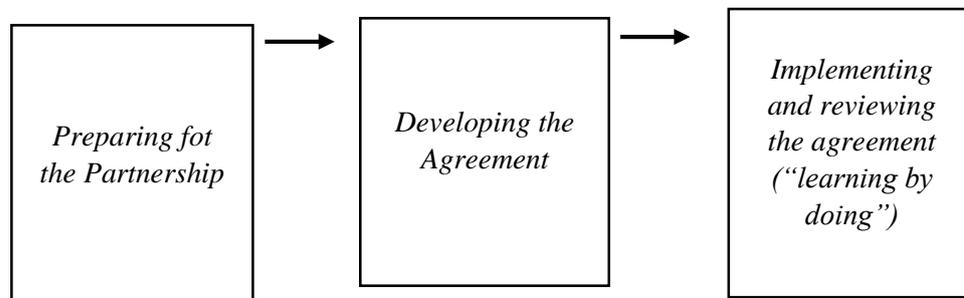
d. Simplifikasi.

Simplifikasi merupakan usaha untuk menerapkan kegiatan yang teratur. Simplifikasi menemukan jawaban mengenai cara-cara yang paling baik untuk digunakan dalam pekerjaan. Untuk mendapatkan jawaban tersebut maka perlu membuat program-program yang *realistic* dan sederhana untuk dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional.

4. Possible Phases/ Steps in Collaborative Management Process

Dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif tentunya terdapat proses atau langkah-langkah yang menjadi alur bagaimana pelaksanaan antara kedua belah pihak melakukan proses manajemen. Langkah-langkah pelaksanaan manajemen kolaboratif dapat dilihat sebagai berikut :

Possible phases / steps in a collaborative management process :²⁵



²⁵ Grazia Borrini-Feyerabend. *Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring The Approach to The Context*. (Switzerland : IUCN The World Conservation Union 1996), hal.36

Bagan 1.1 : Langkah-langkah pelaksanaan manajemen kolaboratif

Dalam hal ini langkah-langkah penerapan manajemen kolaboratif yaitu mempersiapkan kemitraan dengan memperhatikan akses sumber daya yang tersedia dari pihak lain, mengidentifikasi pemangku awal kepentingan utama, meninjau penggunaan lahan dan sumber daya serta konflik yang ada, menilai kebutuhan dan kelayakan mengembangkan perjanjian manajemen kolaboratif, memulai pemangku kepentingan, melaksanakan latihan penilaian partisipatif dan melanjutkan analisis pemangku kepentingan dengan cara partisipatif, yang sesuai. Jika perlu, dukung pemangku kepentingan untuk mengorganisasi, mengidentifikasi perwakilan dan mengembangkan dalam konsensus internal tentang kepentingan dan kepedulian mereka terkait dengan program yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya adalah mengembangkan perjanjian dengan menunjuk fasilitator independen seperti: Mengadakan pertemuan "prosedural" pertama di antara para pemangku kepentingan, mendukung negosiasi, mediasi, atau arbitrase konflik sesuai kebutuhan, Mencapai konsensus dasar dan / atau visi bersama kesepakatan (mis. Nota kesepahaman atau rencana manajemen) dengan menyebutkan pengaturan zonasi dan fungsi-fungsi spesifik, hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan, yang sesuai,

Publikasikan konsensus atau perjanjian, adakan upacara untuk menggarisbawahi pentingnya kegiatan yang akan dilakukan.

Langkah terakhir yaitu menerapkan dan meninjau perjanjian atau dikenal dengan istilah belajar sambil melakukan yang ditandai dengan pelaksanaan kegiatan manajemen yang sesuai kebutuhan, memperjelas tanggung jawab dan hak-hak pemangku kepentingan, mengelola konflik dan menegakkan perjanjian, melakukan pemantauan kegiatan dan hasil (yang diharapkan dan tidak terduga) berdasarkan tujuan atau bereksperimen dengan kegiatan teknis yang lebih kompleks atas dasar visi, kesepakatan dan hasil pemantauan, lakukan tinjauan berkala dengan semua pemangku kepentingan terkait. Jika perlu, lakukan perubahan yang diperlukan dan / atau kembali untuk mengembangkan perjanjian baru.

B. Campus Social Responsibility

1. Pengertian Program Campus Social Responsibility

Program *Campus Social Responsibility* adalah sebuah usaha untuk mengembalikan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial agar kembali menempuh pendidikan. Baik dalam pendidikan formal, informal dan non-formal. Program ini melibatkan pegiat akademik di perguruan tinggi yaitu mahasiswa sebagai kakak pendamping dan Dinas Sosial Kota

Surabaya.²⁶ Anak-anak yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah mereka yang termasuk dalam kasus anak terlantar, anak tersandung masalah hukum, anak yang menjadi korban kekerasan dan lain-lain.

2. Dasar hukum pelaksanaan *Campus Social Responsibility*

Pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* adalah wujud dari dukungan peraturan kenegaraan dibawah ini :²⁷

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran

²⁶ Data Dinas Sosial Kota Surabaya hal.3

²⁷ Ibid, hal.4

Negara Nomor 3835);

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
- l. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- m. Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- n. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

3. Tujuan Program *Campus Social Responsibility*

Tujuan dari program ini ada 2 yaitu :²⁸

- a. Tujuan Umum

²⁸ Ibid, hal.7

Mengembalikan hak anak dengan status sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat tumbuh, hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial

b. Tujuan Khusus\

Adapun tujuan khusus dari program *Campus Social Responsibility* yaitu:

- 1) Memenuhi hak anak-anak dengan status penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya.
- 2) Memenuhi hak anak-anak yang termasuk dalam kasus atau status penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan.
- 3) Memenuhi hak anak-anak yang termasuk dalam kasus atau status penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk berprestasi sesuai dengan bakat, minat dan potensi yang dimiliki untuk kehidupan di kemudian hari.
- 4) Melindungi anak-anak yang termasuk dalam kasus atau status penyandang masalah kesejahteraan sosial dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi sosial dan perlakuan salah lainnya.
- 5) Mencegah anak yang termasuk dalam kasus atau status penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk tidak terjerat kasus hukum.
- 6) Terwujudnya kepedulian mahasiswa untuk berpartisipasi dalam

penanganan masalah sosial.

Tujuan dalam program *Campus Social Responsibility* juga sejalan dengan konsep menjalin hubungan sosial dan berkasih sayang sesama manusia. Dalam Q.S Al-Balad (90:17) yang berbunyi :

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Artinya :

“Mereka yang saling berpesan dengan kesabaran, mereka saling berpesan dengan kasih sayang”

Maksud dalam “saling berpesan” adalah bahwa manusia harus mampu memberikan dampak yang baik pada hidup orang lain. Dengan menolong dalam kesalahan, mengingatkan saat terjadi kesalahan. Sebab kehidupan tidak hanya tentang hidup kita seorang tetapi, juga hidup orang lain.

4. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Campus Social Responsibility*

Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* yaitu ;²⁹

- a. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya

²⁹ Ibid, hal.8

sebagai Koordinator Program dan SKPD terkait.

- b. Universitas di Kota Surabaya yaitu mahasiswa sebagai pendamping.

5. Sasaran *Campus Social Responsibility*

Dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* berfokus pada penganganan Anak bermasalah sosial dan anak rentan bermasalah sosial yang meliputi :³⁰

- a. anak putus sekolah
- b. anak terlantar
- c. anak yang menjadi korban kekerasan / diperlakukan salah
- d. anak nakal
- e. anak jalanan
- f. anak rentan putus sekolah

6. Teknis Pendampingan *Campus Social Responsibility*

Dalam pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* terdapat peran dan fungsi pendampingan sebagai berikut :

- a. Peran Pendamping

Secara umum Pendamping (Mahasiswa) dapat memainkan peran sebagai :

1) Motivator

Pendamping berperan untuk memotivasi kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial bersama orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Contoh : melakukan konseling kepada anak dan orang tua, mengidentifikasi permasalahan dan sebagainya.

2) *Enabler*

Pendamping memiliki peran untuk meyakinkan dan membantu anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orantuanya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan pemanfaatan berbagai sistem sumber yang ada. Contoh : mengidentifikasi potensi sumber daya yang bisa membantu memecahkan masalah, meningkatkan rasa percaya diri anak maupun orang tua dalam mengatasi masalah dan sebagainya.

3) Fasilitator

Pendamping memfasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang tua untuk menyepakati perubahan yang akan dilakukan. Contoh : menerapkan ketrampilan pola asuh orang tua kepada anak

4) *Broke*

Untuk mengatasi masalah yang sedang dialami anak penyandang masalah kesejahteraan sosial maka kakak pendamping yaitu mahasiswa memiliki peran untuk menghubungkan keinginan berbagai pihak agar tujuan pendampingan dapat terlaksana.

5) *Konselor*

Pendamping juga diharuskan memerankan fungsi sebagai konselor yang bertugas dalam mendengar dan sekaligus memberikan pendapat dari keluhan maupun kegundahan anak yang didampingi terkait persoalan sekolah atau problematika anak dan remaja.

6) *Mediator*

Pendamping berfungsi sebagai mediator untuk menghubungkan keinginan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga.

Berperan sebagai *advocate* artinya melakukan kegiatan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Peran ini berkaitan dengan kegiatan politik seperti membantu dalam hal administrasi.

b. Fungsi Pendampingan Program *Campus Social Responsibility*

Adapun Fungsi Pendampingan *Campus Social Responsibility* adalah:³¹

- 1) Memberikan pendampingan sebagai Kakak Asuh kepada anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar.

c. Prinsip – Prinsip Pendampingan *Campus Social Responsibility*

Sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) maka pelayanan yang di berikan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Prinsip Non Diskriminasi
 - a) Bahwa setiap anak yang didampingi berhak mendapatkan pendampingan yang manusiawi, adil tanpa membedakan

³¹ Ibid, hal. 9

jenis kelamin, agama, suku, kebangsaan dan status sosial budaya.

- b) Mampu menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia dewasa.
- c) Mampu menerima perbedaan anak apa adanya sebagai individu yang mempunyai harga diri, potensi, kelebihan dan kemampuan serta mengembangkan sikap empati kepada anak.
- d) Mampu menghadapi anak sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya atau unik dari segi potensi, bakat, minat, latar belakang, cita-cita dan harapan bangsa.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

- a) Mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari berbagai pihak/lembaga referal dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- b) Mengutamakan lingkungan terbaik bagi anak.

3) Prinsip Menghormati Pandangan Anak

- a) Memperhatikan usia dan kematangan anak dalam setiap proses pendampingan dan pengambilan keputusan
- b) Mendorong, memberikan kesempatan dan melibatkan anak seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses

kegiatan layanan serta menumbuhkan tanggung jawab dan keterlibatan anak dalam upaya pemecahan masalah.

c) Menumbuhkan dan memelihara komunikasi yang efektif dan jelas kepada anak dalam pencapaian tujuan pendampingan.

4) Prinsip mengutamakan hak anak akan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

Prinsip ini berarti menghargai bahwa setiap anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas di setiap tahap perkembangannya.

5) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip ini berarti bahwa semua informasi tentang anak adalah dokumen rahasia yang tidak dapat diceritakan pada forum atau orang/lembaga yang tidak berkompeten dengan kebutuhan layanan dan kepentingan terbaik anak.

C. Keterkaitan Manajemen Kolaboratif dan Campus Social Responsibility

Manajemen kolaboratif adalah sebuah teori atau konsep yang menjelaskan bagaimana hubungan dalam bingkai manajemen antara dua pihak atau lebih yang sedang bekerjasama dalam proyek atau program tertentu. Dimana masing-masing pihak memiliki memiliki tujuan tertentu. Sedangkan, dalam hal tanggung jawab sosial. CSR sendiri erat kaitannya dengan

penggunaan dalam singkatan *corporate social responsibility* dan *campus social responsibility*. *Corporate social responsibility* pelaksanaannya adalah perusahaan sedangkan *Campus social responsibility* pelaksanaannya adalah Dinas Sosial dan perguruan tinggi di Kota Surabaya melalui mahasiswa dalam penanganan anak-anak dengan masalah kesejahteraan sosial .

Melihat indikasi bahwa pelaksanaan Program *Campus social responsibility* dalam pelaksanaannya melibatkan sektor silang antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Manajemen kolaborasi hadir sebagai konsep kunci untuk mengetahui bagaimana proses manajemen kolaboratif dengan berdasar pada konsep teori berupa prinsip dan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk memecahkan masalah kesejahteraan sosial pada anak yang kemudian berdampak pada pendidikan anak tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono disebut penelitian kualitatif adalah karena penelitian digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci.³² Sedangkan Faisal menjelaskan maksud dari instrumen kunci adalah peneliti menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi.³³

Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian atau gejala yang sedang berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³⁴ Peneliti bermaksud memaparkan dan mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian terkait pelaksanaan manajemen kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA dalam program *Campus Social Responsibility*.

³² Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Prenada Meedia Group, 2010)., hal 179.

³³ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012)., 124.

³⁴ Ibid, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*., 197.

Jadi penelitian kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana gambaran Manajemen Publik Kolaboratif antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Sosial Surabaya dan UINSA. Adapun kantor Dinas Sosial Kota Surabaya beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Surabaya sedangkan UINSA beralamat di Jalan Ahmad Yani No.117, Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

C. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber data dalam penelitian yang termasuk dalam person dan paper terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.³⁵ Sumber data penelitian yang diperoleh dari lokasi berupa rekaman wawancara, dokumen-dokumen dengan informan dan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Adapun data primer dalam

³⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994),h. 73

penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen berupa :

- a. Dokumen dari Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA
- b. Hasil wawancara dari :
 - 1) Kordinator program *Campus Social Responsibility* dari Dinas Sosial Kota Surabaya.
 - 2) Pembina program *Campus Social Responsibility* UINSA.
 - 3) Mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility*
- c. Lembar observasi

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau pihak ketiga yang memberikan data secara tidak langsung dan fungsinya hanya sebagai data pendukung atau pelengkap. Dalam penelitian ini yaitu : Profil Program *Campus Social Responsibility*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan akuntabel dalam sebuah penelitian maka perlu menggunakan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.³⁶ Teknik ini dilakukan untuk menemukan, mengetahui data dan informasi dari suatu kejadian atau peristiwa yang di bingkai secara sistematis dan di dasarkan pada landasan penelitian yang telah di rumuskan. Sedangkan menurut Kartini Kartono observasi merupakan sebuah studi yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya sistematis mengenai peristiwa sosial dan gejala-gejala alam dengan melakukan pengamatan dan pencatatan.³⁷ Penelitian ini menggunakan (*participant observation*) dimana peneliti terlibat langsung oleh subyek peneliti dan lingkungannya dalalam proses pengumpulan data.³⁸ Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Adapun lembar observasi meliputi :

No	Kebutuhan Data
1.	Profil Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA
1	Data Mahasiswa UINSA yang mengikuti Program CSR
2	Data adik bimbing
3	Data pelaksanaan Program CSR
4.	MoU (<i>Momentum of Understanding</i>)
5.	<i>Book Guidance CSR</i>

³⁶ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 33.

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) Hal 157

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994) Hal. 69

6.	Data Laporan Pendampingan
7.	SOP (<i>Standar Operating Procedure</i>) dan Alur Pendampingan

Tabel 1.1: Indikator Kebutuhan Data Observasi

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁹ Dalam penelitian ini, wawancara atau interview dilakukan secara mendalam dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi.⁴⁰ Teknik wawancara yang digunakan adalah langsung dan tidak langsung. Langsung yang dimaksud adalah wawancara dilakukan langsung bersama responden tanpa perantara, sedangkan wawancara tidak langsung adalah teknik wawancara yang dilakukan bukan pada responden yang dituju melainkan orang lain yang tahu terkait responden tersebut.⁴¹ Adapun proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan memanfaatkan sosial media sebagai penghubung antara responden

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodeologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 1997), 83

⁴⁰ Rulam Ahmadi, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005) Hal. 71

⁴¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 173

dan peneliti seperti aplikasi *Whats App* dan *Zoom*. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti sebagai upaya pencegahan penularan Covid 19 yang mana juga mendukung himbuan pemerintah untuk melakukan *social* dan *physical distancing*.

Adapun responden atau narasumber yang dilibatkan untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut:

Indikator Data Kebutuhan Wawancara

No	Informan	Kebutuhan Data
1	Pihak Dinas Sosial (Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial)	Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Program CSR
2	Dosen Pendamping CSR UINSA	1. Data mengenai kegiatan antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA (wawancara) 2. Kendala dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif selama pelaksanaan program CSR (wawancara)

3	Mahasiswa UINSA yang mengikuti program CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kegiatan pembimbingan kakak pendamping (wawancara dan dokumen) 2. Data mengenai kendala pelaksanaan pembimbingan (wawancara) 3. Data mengenai pendapat kakak pendamping terhadap pelaksanaan pendampingan (wawancara)
---	--	---

Tabel.2: Indikator Data Kebutuhan Wawancara

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari sumber data mengenai sesuatu yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴²

⁴² Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),h. 274.

No	Kebutuhan Data
1	Gambaran umum tentang Program CSR
2	Data yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen kolaboratif
3	Data yang berhubungan dengan pelaksanaan Program CSR
4.	Hasil rapat antara pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan Dosen Pembimbing UINSA dalam program CSR
5.	Hasil evaluasi rapat bersama kakak pendamping
6.	Foto-foto dokumentasi kegiatan <i>youth competition</i> .

Table 3: Indikator Data Kebutuhan Dokumentasi

E. Prosedur Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni tiga tahap analisis data yang dilakukan secara interaktif dan saling berkaitan baik selama atau

⁴³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 147.

sesudah pengumpulan data, sehingga model ini dinamakan model interaktif.⁴⁴ Tiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. Data akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian, data diadopsi sesuai keperluan dan relevan untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk relevansi kepada data yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data berbentuk teks naratif yang ditransformasikan ke berbagai jenis matriks, grafiks, jaringan, maupun bagan.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti mengolah data hasil reduksi untuk ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami berkaitan dengan program kemitraan sekolah.

⁴⁴ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 22-23.

⁴⁵ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 150.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Selama penelitian berlangsung, setiap kesimpulan diambil berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dilakukan dan melalui tahapan verifikasi. Sehingga hasil penelitian ini valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini tidak diragukan kebenarannya dan keakuratan data yang disajikan, maka peneliti perlu melakukan *cross check* untuk menguji keabsahan dan kebenaran data yang didapatkan. Uji keabsahan data ini bertujuan untuk mendapatkan kredibilitas. Untuk itu peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Adapun bentuk triangulasi yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data adalah dengan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

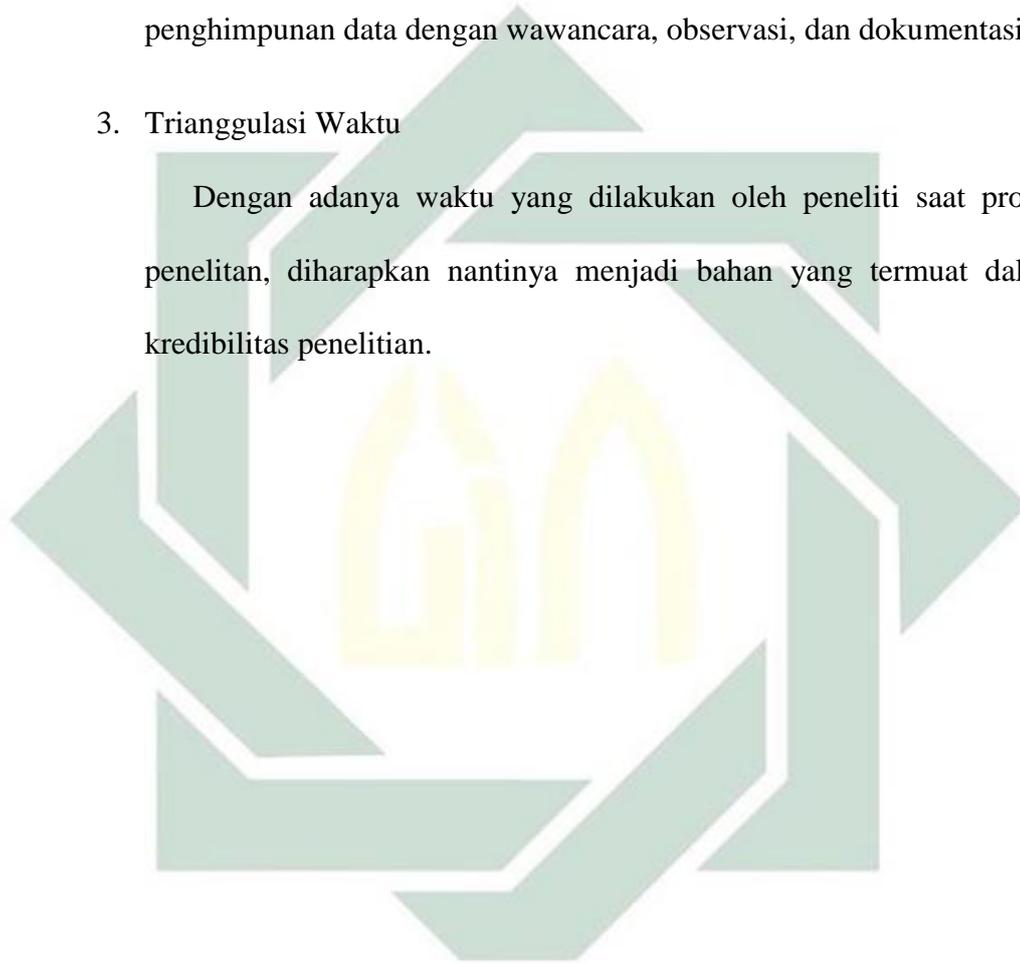
Melakukan pengecekan data yang didapatkan dari berbagai sumber. Dalam konteks ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan Pembina Program *Campus Social Responsibility*, Kordinator pelaksana dari Dinas Sosial Kota Surabaya dan Mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Adapun teknik yang berbeda dapat dikategorikan sebagai bahan dalam menguji kredibilitas penelitian. Baik berupa teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Dengan adanya waktu yang dilakukan oleh peneliti saat proses penelitian, diharapkan nantinya menjadi bahan yang termuat dalam kredibilitas penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Umum Objek Penelitian

1. Dinas Sosial Kota Surabaya

Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan sub unit dari Pemerintah Kota Surabaya yang terbentuk dari amanat Perwali Surabaya (Peraturan Walikota Surabaya) Nomor 53 tahun 2016 yang diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah pada bidang sosial. Adapun deskripsi letak dan identitas kantor Dinas Sosial Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Identitas	Keterangan
Alamat kantor Dinas Sosial Kota Surabaya	Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya
Luas gedung perkantoran	976 m ²
Luas aula dan gedung	250 m ²
Luas perumahan Kepala Dinas	119, 50 m ²
Luas rumah dinas kepala sub-bagian tata usaha	96 m ²
Rumah dinas atau koperasi	96 m ²

Tabel 2.1: Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Surabaya

1) Visi Dinas Sosial Kota Surabaya :

“Fasilitator terdepan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

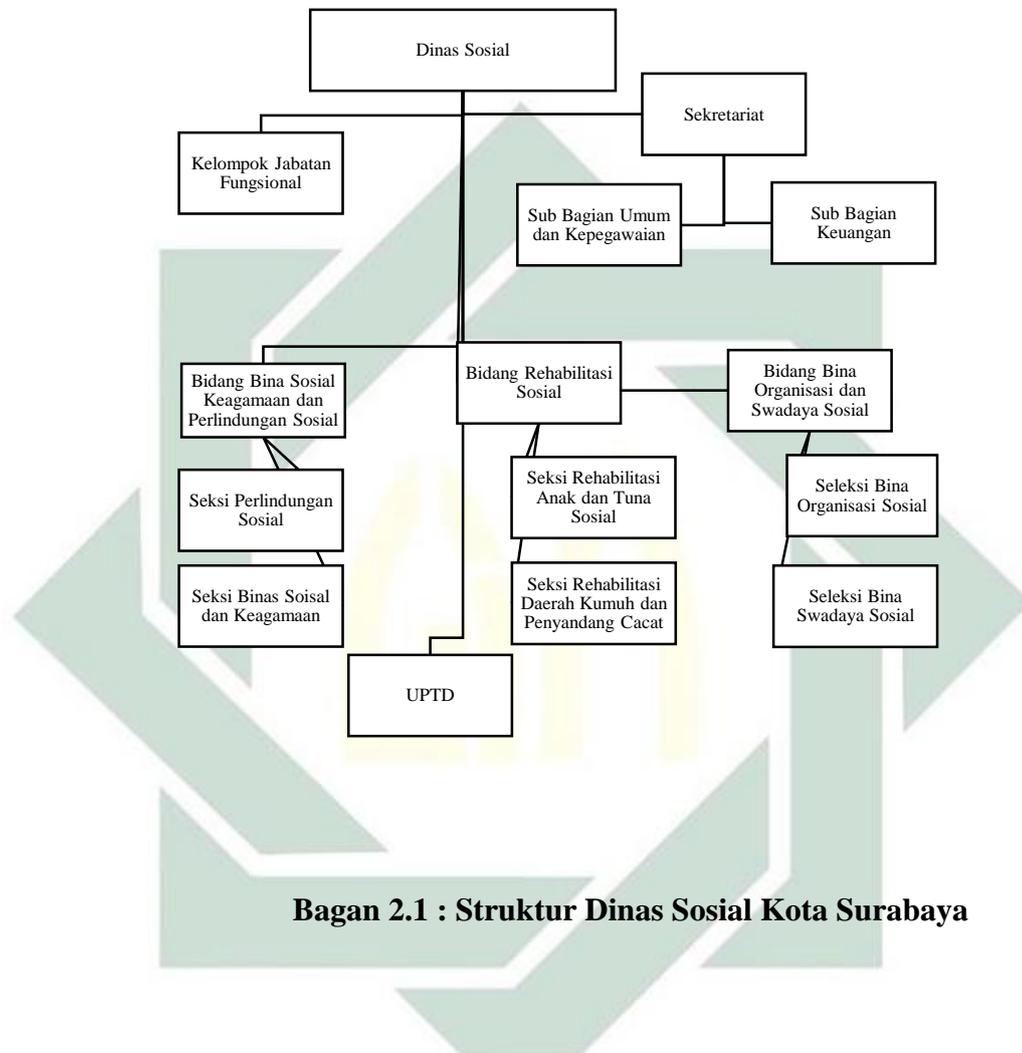
2) Misi Dinas Sosial Kota Surabaya :

- a) Meningkatkan kinerja dinas
- b) Meningkatkan kualitas layanan public yang didukung oleh sistem dan prosedur yang sesuai.
- c) Mewujudkan kerukunan hidup beragama, multikultur dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
- d) Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan seluruh komponen.

b. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya

Dalam sebuah organisasi tentunya terdapat pelaksanaan birokrasi yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Adapun struktur dan tupoksi jabatan pada Dinas Sosial Kota Surabaya adalah:

Struktur Dinas Sosial Kota Surabaya



Bagan 2.1 : Struktur Dinas Sosial Kota Surabaya

2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

a. Profil UINSA

UINSA terletak di pusat Kota Surabaya, Jawa Timur. Satu dari beberapa perguruan tinggi tertua di Indonesia. Tahun 2019, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 167/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019, UINSA telah resmi terakreditasi A secara

institusi. Dalam sistem pembelajaran, UINSA menawarkan rangkaian pilihan program studi yang terakreditasi secara nasional. Serta mengadaptasi standar internasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.⁴⁶

UINSA juga menawarkan sistem belajar yang berkualitas dan pengalaman hidup yang berkarakter bagi para mahasiswa. Dan berpeluang menikmati suasana kehidupan di kota besar kedua di Indonesia dengan lokasi kampus yang sangat strategis di Kota Surabaya. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan, UINSA didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.⁴⁷

UINSA memiliki dua kompleks kampus. Kampus 1 (satu) beralamat di Jl. A Yani No. 117 Surabaya, sedangkan kampus 2 berlokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Anyar yang saat ini dalam tahap pembangunan. Total luas kampus 1 maupun kampus 2 yaitu 259.662 m² Saat ini, UINSA juga memiliki gedung-gedung yang digunakan untuk menunjang kegiatan akademik maupun non akademik dengan luas total 87.509,67 m². Diantaranya terbagi dalam beberapa Fakultas-fakultas yang tersebar di UINSA yaitu :⁴⁸

⁴⁶ Selayang Pandang UINSA.hal. 1

⁴⁷ Ibid. hal.1

⁴⁸ Ibid.hal.3

No.	Fakultas	Jumlah Ruang Kelas	Luas Ruang Kelas	Luas Gedung
1.	Pascasarjana	24	1.035,00 m ²	3311,00 m ²
2.	Dakwah dan komunikasi	32	1.042,50 m ²	1.743,00 m ²
3.	Psikologi dan kesehatan	8	-	0 m ²
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	33	1.235,00 m ²	2.873,64 m ²
5.	Tarbiyah dan Keguruan	40	2.391,00 m ²	3.639,00 m ²
6.	Ilmu Sosial dan Politik	25	1.092,00 m ²	1.530,90 m ²
7.	Sains dan Teknologi	22	770,00 m ²	2.690,00 m ²
8.	Adab dan Humaniora	35	32,00 m ²	1947,50 m ²

9.	Syariah dan Hukum	34	214,00 m ²	3.679,00 m ²
10.	Ushuludin dan Filsafat	26	237,50 m ²	2378,50 m ²

Tabel 2.2: Luas Lahan UINSA

Fasilitas lainnya, adalah Laboratorium yang berjumlah 53 Laboratorium dan tersebar di berbagai fakultas dengan luas total 3.222,00 m². Untuk keseluruhan gedung, sarana, dan prasarana dibiayai dari dana Hibah dan lain-lain.

b. Visi dan Misi UINSA

1). Visi :⁴⁹

“Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan Kompetitif Bertaraf Internasional”

2). Misi :⁵⁰

- a) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu Ke-Islaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing
- b) Mengembangkan riset ilmu-ilmu Ke-Islaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

⁴⁹ Visi Misi UINSA diakses pada laman <https://w3.uinsby.ac.id/tentang-uinsa>

⁵⁰ Ibid

c). Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset.

c. Tokoh UINSA

Pada tahun 1961, UINSA yang kala itu masih berstatus sebagai IAIN Cabang Surabaya merupakan bagian dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Saat ini UIN Sunan Kalijaga). Bertindak selaku Rektor adalah Prof. R.H.A. Soenarjo, SH., yang juga dikenal sebagai Presiden IAIN pertama di Indonesia. Sedangkan untuk Fakultas Syariah di Surabaya, dipimpin Dekan Prof. KHM. Syafii A. Karim. Selanjutnya Fakultas Tarbiyah di Malang dipimpin Prof. Mr. Moh. Koesnoe, SH. Termasuk, pada 1 Oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 66 Tahun 1964 terkait berdirinya Fakultas Ushuluddin di Kediri yang dipimpin Dekan KH. A. Zaini. Selanjutnya, setelah resmi menjadi kampus mandiri tanpa fakultas di daerah IAIN SA atau UINSA hingga periode 2018-2022.⁵¹

Pada tahun 1961, UINSA yang kala itu masih berstatus sebagai IAIN Cabang Surabaya merupakan bagian dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Saat ini UIN Sunan Kalijaga). Bertindak selaku Rektor adalah Prof. R.H.A. Soenarjo, SH., yang juga dikenal sebagai Presiden IAIN pertama di Indonesia. Sedangkan untuk Fakultas Syariah di Surabaya, dipimpin Dekan Prof. KHM. Syafii A. Karim. Selanjutnya Fakultas Tarbiyah di Malang dipimpin Prof. Mr. Moh.

⁵¹ Ibid, Selayang Pandang UINSA. hal 5

Koesnoe, SH. Termasuk, pada 1 Oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 66 Tahun 1964 terkait berdirinya Fakultas Ushuluddin di Kediri yang dipimpin Dekan KH. A. Zaini. Selanjutnya, setelah resmi menjadi kampus mandiri tanpa fakultas di daerah IAIN SA atau UINSA hingga periode 2018-2022 dipimpin oleh 9 Rektor, antara lain: ⁵²

- a) 1965-1972 : Prof. H. Teuku Ya'qub Isma'il, SH., MA
- b) 1972-1975 : Prof. Dr. Syafi'i A. Karim
- c) 1975-1987 : Drs. Marsekan Fatawi
- d) 1987-1992 : Dr. H. Bisri Afandi, MA
- e) 1992-2000 : Drs. KH. Abd. Jabar Adlan
- f) 2000-2008 : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
- g) 2009-2012 : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
- h) 2012-2018 : Prof. Dr. H. Abd. A'la., M.Ag.
- i) 2018-2022 : Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.

a. Kerjasama UINSA

⁵² Ibid, hal.7

Alih Status IAIN menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013 juga menjadi langkah baru bagi UINSA untuk mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi dan atau stakeholder terkait. Hingga 31 Desember 2019, total kerjasama yang terjalin sebanyak 153 MoU/MoA. Berdasarkan total MoU/MoA tersebut sebanyak 128 merupakan kerjasama Dalam Negeri dan 25 Kerjasama Luar Negeri. Selanjutnya berdasarkan kategori kelembagaan, MoU/MoA Dalam Negeri UINSA terdiri dari 13 Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, 83 Lembaga pendidikan, 31 Lembaga Pemerintahan, dan 1 Lembaga Lainnya. Sedangkan untuk kerjasama luar negeri terbagi berdasarkan benua, antara lain: Benua Asia 14 kerjasama, Benua Afrika 3, Benua Eropa 7, dan Benua Amerika Utara 1 kerjasama. Pada Benua Asia, Kerjasama UINSA meliputi wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, Hongkong, Pakistan, Iran, Lebanon, dan Syiria. Benua Afrika terdiri dari Mesir dan Maroko. Benua Eropa antara lain Belanda, Jerman dan Turki. Terakhir di Benua Amerika Utara dengan Canada.⁵³

⁵³ Ibid.hal.52

B. Deskripsi Hasil Penelitian Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya Dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*.

1. Langkah-langkah manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*

Dalam pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* yang melibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA termasuk dalam model manajemen kolaboratif *Donor Receipt Model*. Dimana menurut model ini dalam melaksanakan kegiatan melibatkan para stakeholder dalam sistem kolaboratif yang saling tergantung satu sama lain melalui *control system* yang dijalankan. Landasan empiris untuk model manajemen sebagian besar berasal dari implementasi kebijakan yang telah melihat unsur partisipasi. Adapun langkah-langkah atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui program *Campus Social Responsibility* yaitu :

a. *Preparing for The Partnership*

Langkah pertama dalam manajemen kolaboratif yaitu mempersiapkan kemitraan dengan memperhatikan akses sumber daya yang tersedia dari pihak lain, mengidentifikasi pemangku awal kepentingan utama, meninjau penggunaan lahan dan sumber daya serta konflik yang ada, menilai kebutuhan dan kelayakan mengembangkan perjanjian manajemen kolaboratif, memulai pemangku kepentingan, melaksanakan latihan penilaian partisipatif dan melanjutkan analisis

pemangku kepentingan dengan cara partisipatif, yang sesuai. Jika perlu, dukung pemangku kepentingan untuk mengorganisasi, mengidentifikasi perwakilan dan mengembangkan dalam konsensus internal tentang kepentingan dan kepedulian mereka terkait dengan program yang akan dilaksanakan.

Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Surabaya menyiapkan mitra dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* dengan melakukan survey terhadap berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya. Adapun UINSA menjadi mitra dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* dengan beberapa alasan sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa :

“UINSA dinilai memiliki empati dan mau untuk bekerjasama tanpa mengharapkan kompensasi. Selain itu, UINSA dinilai sebagai kampus yang memiliki *background* dan status sebagai perguruan tinggi islam. Dengan terjalinnya kegiatan manajemen bersama UINSA pihak dinsos berharap UINSA melalui mahasiswanya dapat melakukan pendekatan religius dalam menangani permasalahan adik asuh. Potensi mahasiswa untuk bergabung dalam program CSR sangat besar dan juga antusiasme mahasiswa sangat besar. Hubungan antara dinsos dan UINSA sudah terjalin sangat lama sebelum CSR. Saat mengundang baik dalam event Pemerintah Kota Surabaya atau dari Dinas Sosial sendiri, pimpinan atau dosen UINSA untuk kegiatan ceramah. Dari kegiatan tersebut inilah menjadi pintu masuk menjalin manajemen kolaboratif dalam csr. Jumlah anggota yang bergabung di UINSA sejak awal mula csr yaitu 2014. Jumlah peserta yang bergabung

sangat bervariasi. Tapi, uinsa adalah kampus pionir dalam csr. Sebab sejak awal csr dilaksanakan UINSA sudah bergabung.’’⁵⁴

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan kegiatan manajemen kolaboratif dalam Program Campus Social Responsibility adalah sebagai berikut ::⁵⁵

- a) UINSA dinilai sebagai perguruan tinggi yang menjadi pionir dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility*. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya UINSA sejak awal pelaksanaan program pada tahun 2014.
- b) UINSA memiliki empati terhadap penanganan masalah anak penyandang penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan keaktifan yang ditunjukkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- c) UINSA merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam yang tergabung dalam program *Campus Social Responsibility* dimana diharapkan mampu melakukan pendampingan kepada adik asuh dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dengan tujuan mengubah pola pikir dan tingkah laku adik asuh. Sehingga mampu mencapai tujuan pendampingan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020

⁵⁵ Wawancara bersama Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 20 Februari 2020

- d) Potensi mahasiswa UINSA dalam mengikuti program *Campus Social Responsibility* sangat besar. Berasal dari latar belakang program studi yang bervariasi dan juga jumlah mahasiswa sebagai pendaftar selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 37 mahasiswa sebagai kakak pendamping yang berhasil lolos dalam seleksi internal kampus dan pada tahun 2020 sebanyak 42 mahasiswa sebagai kakak pendamping.
- e) Lokasi UINSA dinilai sangat strategis dengan wilayah yang menjadi mayoritas tempat tinggal adik bimbing. Pada tahun 2019 mahasiswa UINSA tercatat telah melakukan pendampingan pada wilayah dibawah ini :⁵⁶

Nama Kecamatan	Jumlah adik asuh	Jarak UINSA-Rumah adik asuh
Bubutan	5 (lima)	12 km
Wonocolo	6 (enam)	1 km
Wonokromo	11 (sebelas)	6,2 km
Gayungan	15 (lima belas)	4,0 km

Tabel 3.1: Wilayah Pendampingan Mahasiswa UINSA

Tahun 2019

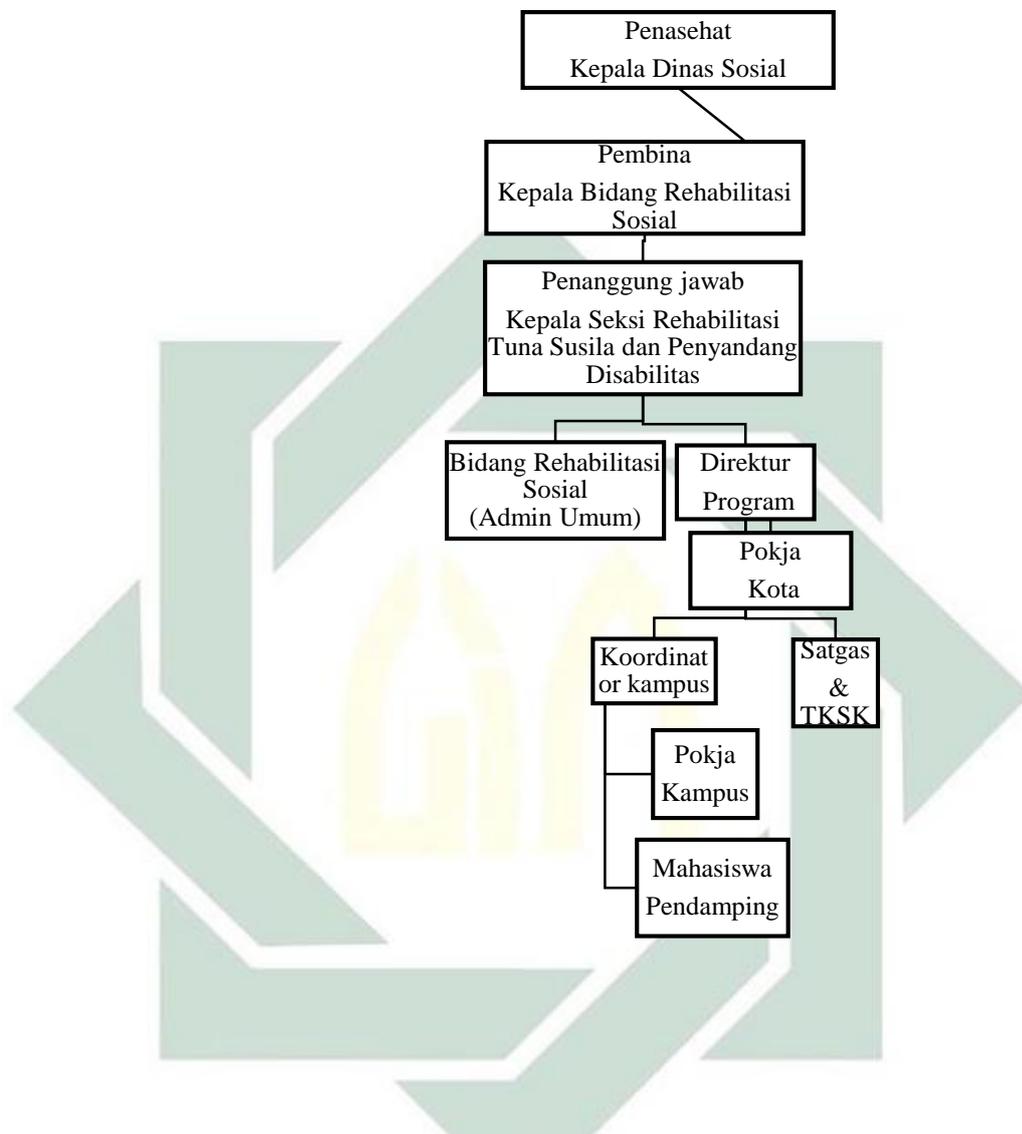
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa letak UINSA dan wilayah pendampingan sangat berdekatan sehingga memudahkan kegiatan pendampingan berjalan dengan baik.

⁵⁶ File dokumentasi anggota CSR 2019

Selain itu, pihak UINSA juga memiliki kesamaan kegiatan yang terintegratif dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* seperti kegiatan KKN (Kerja Kuliah Nyata). Adapun teknis dalam pelaksanaan KKN CSR ini adalah pelaksanaan pendampingan selama kurun waktu 1 (satu) tahun lamanya secara aktif dan progresif. Pelaksanaan KKN CSR ini berada dibawah naungan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi.

Dalam program *Campus Social Responsibility*, Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai *conceptor* sedangkan perguruan tinggi atau UINSA sebagai *actor* atau penggerak dalam program ini memiliki struktur sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁷ Dokumentasi dari Struktur Organisasi CSR



Bagan 2.2 : Struktur Organisasi CSR

Dalam penyelenggaraan program *Campus Social Responsibility* Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai penasehat, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pembina dan Penanggung jawab adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas. Program *Campus Social Responsibility* merupakan agenda kegiatan dari Bidang Rehabilitasi Sosial. Adapun

tupoksi dari bidang rehabilitasi sosial dalam pelaksanaan Program

Campus Social Responsibility adalah sebagai berikut :

Koordinator Kampus	Satgas dan TKSK	Pokja Kota	Pokja Kampus
1. Memasangkan adik asuh dan kakak pendamping sesuai data dampingan	1. Fasilitator pelaksanaan program pendampingan di wilayah dampingan	1. Mengkoordinir seluruh mahasiswa pendamping dalam pelaksanaan kegiatan CSR	1. Mengkoordinir seluruh mahasiswa pendamping dalam pelaksanaan kegiatan CSR
2. Melakukan update data sesuai data dampingan	2. Memonitoring kegiatan pendampingan yang dilakukan kakak pendamping setiap melakukan kunjungan	2. Membuat program kerja dalam menunjang kegiatan CSR	2. Memonitoring keaktifan pendampingan
3. Mengkoordinasikan segala kegiatan CSR dengan menyampaikan informasi		3. Memonitoring keaktifan	3. Mengkoordinasikan segala informasi

dari atas ke bawah	3. Membantu penyelenggara	pendampingan	dari Koordinator
4. Memfasilitasi /mengkoordinasikan	an kegiatan pendampingan dengan	4. Mengkoordinasikan	dan Pokja Kota
kebutuhan dan temuan	memberikan penyuluhan dan bimbingan	segala informasi dari Dinas Sosial	kepada seluruh mahasiswa
Satgas & kakak pendamping	terhadap permasalahan yang	kepada seluruh mahasiswa	pendamping se Wilayah Koordinasi
kepada Direktur Program	diketemukan kakak pendamping	pendamping	4. Memetakan
5. Merekap laporan	4. Melakukan koordinasi	5. Memetakan temuan masalah dan	temuan masalah dan
kegiatan kakak pendamping	dengan PSKS lainnya terkait	mencarikan solusi dari permasalahan	mencarikan solusi dari permasalahan
dari Satgas	penyelesaian permasalahan	solusi dari permasalahan dengan berkoordinasi	solusi dari permasalahan dengan berkoordinasi
6. Melaporkan update data	permasalahan kesejahteraan sosial	n dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial	si dengan Satgas, TKSK dan Pokja Kota
kepada Bidang			

<p>Rehabsos dan Direktur Program 7. Memonitorin g kegiatan kakak pendamping melalui Satgas dan Pokja Kampus</p>	<p>(pendampingan CSR) 5. Membantu mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (pendampingan CSR). 6. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan pendampingan berupa rekap laporan dari</p>		
---	---	--	--

	seluruh kakak pendamping di wilayahnya setiap bulan		
--	--	--	--

Tabel 3.2: Tupoksi Tim Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Program CSR

b. Developing The Agreement (Mengembangkan Persetujuan)

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan perjanjian dengan menunjuk fasilitator independen seperti: Mengadakan pertemuan "prosedural" pertama di antara para pemangku kepentingan, mendukung negosiasi, mediasi, atau arbitrase konflik sesuai kebutuhan, Mencapai konsensus dasar dan / atau visi bersama kesepakatan (misalnya Nota kesepahaman atau rencana manajemen) dengan menyebutkan pengaturan zonasi dan fungsi-fungsi spesifik, hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan, yang sesuai, Publikasikan konsensus atau perjanjian, adakan upacara untuk menggarisbawahi pentingnya kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam mengembangkan persetujuan kerjasama tersebut maka dibutuhkan fasilitator yang sifatnya independen. Hal ini dukungan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi memerlukan perwakilan dari pihak UINSA. Perwakilan ini ditunjuk berdasarkan

kualifikasi tertentu yang diberikan sepenuhnya oleh pihak kampus. Selama ini, perwakilan atau dosen pembimbing dalam kegiatan program *Campus Social Responsibility* berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA.

Dosen pembimbing dalam program *Campus Social Responsibility* bertugas untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan koordinasi dan komunikasi yang bersifat vertical maupun horizontal.⁵⁸ Contohnya : Komunikasi antara pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Komukasi antara Dinas Kota Sosial Surabaya dan Kakak Pendamping (Mahasiswa).

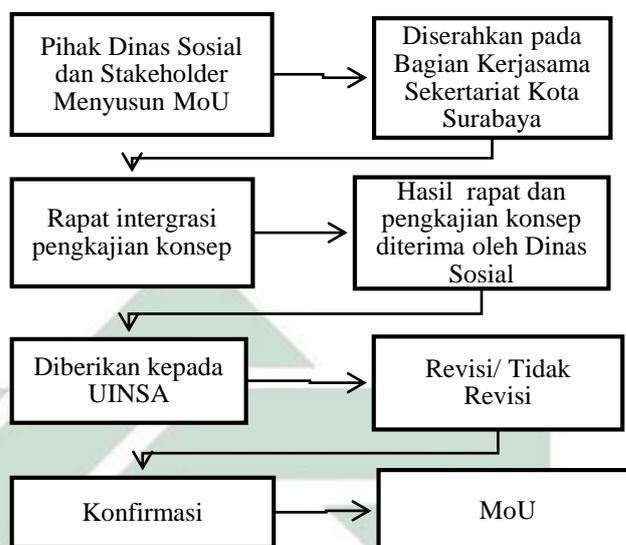
Setelah melakukan pemilihan dosen pembimbing untuk proses koordinasi. Selanjutnya adalah Perumusan perjanjian manajemen kolaboratif ini melibatkan sektor pemerintahan yang lebih luas seperti Pemerintah Kota Surabaya. Adapaun alur pelaksanaan pembuatan perjanjian dalam program *Campus Social Responsibility* atau MoU (Memorandum of Undersatnding) menurut hasil wawancara bersama Bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa :

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020

“Setelah melakukan koordinasi dan komunikasi bahwa telah menerima untuk bergabung lalu dinsos menyusun naskah kerja yaitu MoU (Memorandum of Understanding). Dinas sosial menyiapkan konsep atau MoU hasil konsep tersebut kemudian diserahkan kepada Bagian kerjasama bagian sekretariat Kota Surabaya. Kenapa tidak dinsos sendiri yang menegaskan MoU tersebut / karena ruang lingkup tugas dan wewenang dinsos hanya pada hal kerjasama adalah kewenangan pemerintah kota Surabaya. Sebab dinsos adalah bagian dari pemkot Surabaya. Jika MoU itu dinyatakan selesai koreksi maka sudah tindak lanjut bagian kerjasama. Bagian kerjasama kemudian akan memanggil stakeholder yaitu pihak dinsos, pemkot untuk wilayah dengan angka pmks terbanyak, wartawan, dinas pendidikan dan tokoh-tokoh dari perguruan tinggi adalah sebuah tim. Setelah itu MoU diberikan kepada perguruan tinggi untuk disepakati adapun koreksi akan diterima jika tidak keluar dari visi misi dan kembali dikonsultasikan ke bagian kerjasama. Setelah itu bagian kerjasama mengirimkan surat permohonan ke walikota untuk diberikan pendelegasian, mandate atau kuasa kepada kepala dinsos untuk mewakili penanda tangan MoU tersebut dengan pihak kampus”⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan MoU adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020



Bagan 3.1: Alur pembuatan MoU

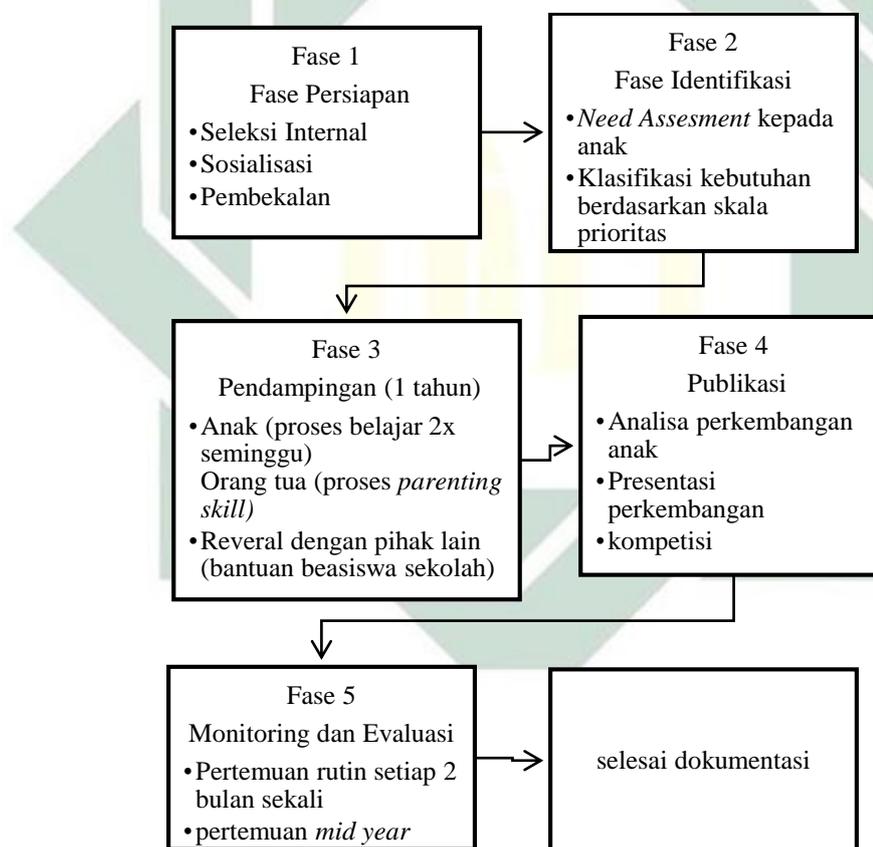
Pembuatan MoU antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Surabaya melibatkan stakeholder lainnya. Dalam penyusunan konsep tersebut menghadirkan para pakar pendidikan yang berasal dari civitas akademika yaitu dosen dari perguruan tinggi lainnya, wartawan, psikolog dan lain-lain yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan. Setelah konsep tersebut selesai maka diserahkan kepada Bidang kerjasama Sekretariat Kota Surabaya dan dilakukan pengkajian dengan *stakeholder* serta melibatkan dinas pendidikan untuk mengkaji konsep tersebut. Kemudian hasil rapat tersebut diberikan kembali kepada Dinas Sosial Kota Surabaya yang akan diberikan ke berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya salah satunya adalah UINSA untuk mengetahui konsep dasar dan menyelaraskan tujuan antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA. Jika, konsep tersebut diterima

maka akan dipatenkan menjadi MoU (*Memorandum of Understanding*). Namun jika sebaliknya, masukan atau revisi tersebut akan dikaji dan diterima jika tidak menyalahi visi, misi dan tujuan dari program *Campus Social Responsibility*. Dalam MoU yang ditandatangani pada hari jum'at 23 Agustus 2019 dengan masa akhir selama 2 (dua) tahun lamanya menerangkan beberapa hal seperti: Maksud dan tujuan, obyek dan ruanglingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu kerjasama, berakhirnya perjanjian, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, addendum dan koresponden.

c. *Implementing and Reviewing The Agreement* (Menerapkan dan Meninjau perjanjian)

Langkah terakhir yaitu menerapkan dan meninjau perjanjian atau dikenal dengan istilah belajar sambil melakukan yang ditandai dengan pelaksanaan kegiatan manajemen yang sesuai kebutuhan, memperjelas tanggung jawab dan hak-hak pemangku kepentingan, mengelola konflik dan menegakkan perjanjian, melakukan pemantauan kegiatan dan hasil (yang diharapkan dan tidak terduga) berdasarkan tujuan atau bereksperimen dengan kegiatan teknis yang lebih kompleks atas dasar visi, kesepakatan dan hasil pemantauan, lakukan tinjauan berkala dengan semua pemangku kepentingan terkait. Jika perlu, lakukan perubahan yang diperlukan dan / atau kembali untuk mengembangkan perjanjian baru.

Dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati oleh pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA menerangkan bahwa hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak yang dikembangkan dalam SOP (*Standard Operating Procedure*). Dalam SOP tersebut menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA yaitu :⁶⁰



Bagan 4.1 : Fase-fase pelaksanaan program CSR

⁶⁰ *Guidance Book CSR*, hal. 16

Fase Pertama, yaitu fase persiapan dimulai dengan seleksi internal calon mahasiswa pendamping yang dilakukan oleh pihak UINSA. Seleksi internal ini meliputi tahapan seleksi administrasi atau dikenal dengan seleksi berkas, wawancara atau *interview*, melakukan survey berupa kunjungan ke rumah adik bimbing. Setelah seleksi internal dilakukan dan mahasiswa pendamping telah ditentukan maka dilakukan sosialisasi dan pembekalan terkait pelaksanaan pendampingan kepada adik asuh.

Fase kedua, adalah fase identifikasi dimana kakak pendamping melakukan *need assessment* atau analisis kebutuhan adik asuh. Analisis kebutuhan ini berupa list kebutuhan yang diperlukan oleh adik asuh untuk mendukung pendidikannya. Setelah itu, mahasiswa pendamping akan membuat klasifikasi kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Artinya, dari sekian banyak kebutuhan yang diperlukan maka kakak pendamping melakukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak dan segera untuk terpenuhi.

Fase ketiga, yaitu pelaksanaan pendampingan selama 1 (satu) tahun. Dimana kakak pendamping akan melakukan pendampingan bersama adik asuh minimal 2x (dua kali) dalam seminggu. Adapun jika permasalahan sosial yang dialami oleh anak terdapat pada orang tuanya maka kakak jipendamping juga melakukan pendekatan secara personal untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya pendidikan untuk anak. Pada

beberapa kasus pendampingan yang terjadi permasalahan sosial yang menyebabkan anak putus sekolah adalah keadaan ekonomi keluarga. Dimana keadaan ini juga menghambat proses pendampingan. Maka, kakak pendamping atau mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan reveral pada pihak lain.

Adapun dalam program *Campus Social Responsibility* proses pendampingan yang dilakukan oleh kakak pendamping kepada kepada adik asuh adalah sebagai berikut :⁶¹

Berikut adalah jenis anak yang di damping dan cara penanganannya :⁶²

a. Anak Putus Sekolah

Yang akan di lakukan pendamping kepada anak-anak putus sekolah adalah :

- 1) Menggali permasalahan dasar yang menyebabkan anak putus sekolah baik kepada anak maupun orang tua/keluarga.
- 2) Memberikan motivasi kepada anak untuk mau kembali ke sekolah melalui proses konseling
- 3) Memberikan pemahaman kepada orang tua untuk mendukung anak kembali ke sekolah
- 4) Mengakseskan dengan kegiatan layanan kesiapan belajar.

⁶¹ Ibid. hal 18

⁶² Ibid. hal 8-11

Kegiatan ini adalah kegiatan transisional, berupa layanan remedial atau layanan perantaraan/penghantaran (*Bridging Course*)

- 5) Mengakseskan melalui bantuan pendidikan berupa beasiswa dan dukungan sekolah lainnya kepada pihak-pihak yang dirasa pendamping bisa membantu, misal lewat swasta, masyarakat maupun pemerintah.
- 6) Melakukan pendampingan rutin kepada anak melalui kegiatan home visit. Pendampingan tersebut dapat diisi dengan kegiatan konseling untuk meningkatkan rasa percaya diri anak maupun kegiatan pendampingan belajar.

b. Anak Terlantar

Yang akan dilakukan pendamping kepada anak terlantar adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menemukan penyebab anak menjadi terlantar.
- 2) Mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak tersebut.
- 3) Memberikan bantuan kepada anak atau keluarga misal bantuan berupa pangan (sembako), sandang, dimana bantuan ini hasil dari mobilisasi kepada pihak-pihak yang peduli permasalahan sosial
- 4) Mengakseskan kepada layanan pendidikan jika anak

tersebut putus sekolah

- 5) Mengakseskan kepada layanan kesehatan jika anak tersebut memerlukan rujukan
- 6) Mengakseskan kepada layanan administrasi kependudukan jika anak memerlukan layanan dasar administrasi kependudukan seperti akte lahir, Kartu Keluarga, BPJS, dan sejenisnya.
- 7) Melakukan pendampingan rutin kepada anak melalui kegiatan home visit. Pendampingan tersebut dapat diisi dengan kegiatan konseling untuk meningkatkan rasa percaya diri anak maupun kegiatan pendampingan belajar.

c. Anak Yang Menjadi Korban Tindak kekerasan atau Diperlakukan Salah

Yang dilakukan pendamping kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diperlakukan salah adalah :

- 1) Melakukan penggalan masalah yang menyebabkan anak menjadi korban.
- 2) Mengakseskan/melakukan rujukan kepada layanan yang menyediakan bantuan rehabilitasi kepada korban baik secara mental, fisik yang diperlukan
- 3) Melakukan bimbingan dan konsultasi untuk menguatkan mental anak serta mengembalikan rasa percaya diri

- 4) Melakukan pendampingan sebagai paralegal selama proses hukum berlangsung jika diperlukan.

d. Anak Nakal

Yang akan dilakukan pendamping kepada anak nakal yaitu :

- 1) Melakukan identifikasi masalah yang menyebabkan anak berperilaku nakal
- 2) Melakukan pendampingan rutin kepada anak melalui konseling anak sehingga terbangun kedekatan emosional kepada anak.
- 3) Melakukan bimbingan dan konsultasi tentang perilaku anak dan bahayanya
- 4) Menemukan potensi anak sehingga bisa menjadi usulan alternatif kegiatan pengalihan anak untuk tidak melakukan kenakalan.
- 5) Mengakseskan potensi anak melalui kegiatan yang mereka minati ke pihak-pihak manapun.

e. Anak Jalanan

Yang harus dilakukan pendamping untuk anak jalanan tersebut adalah :

- 1) Melakukan bimbingan dan konsultasi tentang perilaku, bahaya hidup di jalan, eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada mereka.
- 2) Melakukan pemantauan upaya pemenuhan gizi/nutrisi dan

sanitasi keluarga anak agar menunjang tumbuh kembang mereka.

- 3) Menyediakan perlengkapan belajar
- 4) Mengakseskan ke pendidikan misal lewat pendidikan formal, non formal ataupun informal.
- 5) Mengupayakan ada pemberian beasiswa bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan melalui potensi-potensi yang ada di pemerintah maupun swasta.
- 6) Memberikan pendidikan life skills (kecakapan hidup) kepada anak.

Dalam penyelesaian masalah adik asuh, mahasiswa sebagai kakak pendamping berusaha untuk memberikan solusi agar dapat memastikan bahwa adik asuh tetap bersekolah. Seperti permohonan bantuan pendidikan yang dilakukan dalam bentuk keringanan uang pembayaran sekolah, transportasi dan les private. Adapun data penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh kakak pendamping (mahasiswa UINSA) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁶³

No	Nama	Sekolah
1	Agnia Shava	PAUD / PTT. Anggrek RW. V

⁶³ Laporan Pendampingan Tahun 2019

2	Ahda Sabilah	MI Dewi Sartika Kelas 1
3	Pethricia	SMKN 8 Kelas X
4	Alfiansyah Pratama	SMP Muhammadiyah 9 Kelas VII C
5	Andi Rudiansyah	SMP Bina Bangsa
6	Yasin Muchammad Iham	SMK Dharma Bahari Kelas XI TKR 4
7	Nur hayati	SMK Dharma Bahari Kelas XI TKJ
8	Mohammad Rizky Nurianto	SMK Unitomo Kelas X
9	Aji Muhammad Yogi	SMK Rajasa Kelas XII TKR 3
10	Nova Dwi Puspitasari	SMK KAL Kelas XI

Tabel 4.1 : Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan

Bulan Agustus 2019

No	Nama	Sekolah
----	------	---------

1	Anis Wahyuningsih	SMK Adhikawacana Kelas XII APK 1
2	Putri Septiasari	SMK Adhikawacana Kelas XI AK 3
3	May Rani	SMK Gama Cendekia Surabaya Kelas XI Pemasaran
4	Intan Yunita	SMA Dr. Soetomo Kelas X 1A
5	Jhon Marchellyno Imanuel	SD Negeri Semolowaru 261
6	Citra Ayu Desvita Putri	SMP YP. 17
7	Andi Rudiansyah	SMA Kemala Bhayangkari , Jalan Gresik No. 39 Surabaya
8	Alfikul Yulia S	SMK Kawung 2 Surabaya
9	Astrit Rizma Alisiawati	SMA Muhammadiyah 7
10	Wahyu Dwi Saputra	SD Islam Hasyim Asy'ari

**Tabel 4.2: Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan
Bulan September 2019**

No	Nama	Sekolah
1	Anugrah Tamrin Makruf Hamdani	Masuk SMK Dharma Bahari Kelas X
2	Nabillah Shofi F.G	Masuk SMA Ta'miriyah
3	Ocha Lola Pitaloka	Masuk SMA Ta'miriyah
4	Claudio Kurnia Raharja	Masuk SMA Ta'miriyah
5	Agnesia Yuniar	SMP Bina Insani
6	Tegar Sasongko	SMA Wachid Hasyim
7	Steven	Masuk TK MUSRA
8	Akhmad Nufail Azwar	Masuk TK Jambangan Jaya
9	Indra Firmansyah	SMP Ma'Arif Hasanuddin
10	Dava Ridho Akbar	SMK KAL Kelas XII
11	Aryan Anderson Pollo	SMK St. Louis Kelas X

Tabel 4.3 : Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan

Bulan Oktober 2019

--	--	--

No	Nama	Sekolah
1	Awang Jagad Akbar	Sma Kartini Kelas X
2	Melvino Alfeus N	Sma Kristen YPPK Kelas X – IPA
3	Bianda Farah Putri	Sman 4 Kelas X
4	Anugrah Tamrin	Smk Saripraja Kelas X
5	Septian Catur Nugraha (Agra)	Smp Baitul Fattah Kelas IX
6	M. Antariksa	Smpn 32 Kelas VII

**Table 4: Penyelesaian Permohonan Bantuan Pendidikan
Bulan November 2019**

Selama bulan agustus hingga November total sebanyak 37 kasus permohonan bantuan yang diselesaikan oleh kakak pendamping dari UINSA. Pada bulan agustus dan September sebanyak 10 kasus permohonan bantuan pendidikan. Sedangkan pada bulan oktober sebanyak 11 kasus dan di bulan November sebanyak 6 kasus.

Fase keempat, adalah fase publikasi. Setiap kakak pendamping melakukan analisis perkembangan adik asuh kemudian

melakukan sesi presentasi untuk menjelaskan sejauh mana perkembangan pendampingan yang dilakukan. Pada fase ini mahasiswa juga mengikuti kompetisi kakak pendamping atau dikenal dengan “*Youth Competition*”.

Pada kompetisi ini terdapat 3 (tiga) cabang lomba yaitu kategori kakak pendamping dengan kriteria *High prouctivity*, *caring* dan *innovator*. Adapun prestasi UINSA dalam mengikuti *Youth Competition* yaitu :

No.	Juara	Kategori	Tahun
1.	Juara I	Kampus peduli sosial terbaik se-surabaya	2014
2.	Juara I	Kampus peduli sosial terbaik se-surabaya	2015
3.	Juara harapan II	Kampus peduli sosial terbaik se-surabaya	2016
4.	Juara I	<i>High Productivity</i>	2017
5.	Juara II	<i>Caring</i>	2017
6.	Juara I	Kampus peduli sosial terbaik se-surabaya	2017
7.	Juara harapan I	<i>High Productivity</i>	2018

8.	Juara harapan I	<i>Caring</i>	2018
9.	Juara 1	<i>High Productivity</i>	2019
10.	Juara harapan 1	<i>Innovator</i>	2019

Tabel 4.5 : Prestasi UINSA Pada Youth Competition

Fase kelima, Monitoring dan evaluasi. Pada fase ini dilakukan pertemuan atau rapat bersama para *stakeholder*. Pertemuan rutin yang dilakukan 2 (dua) bulan sekali melibatkan dosen pembimbing guna membahas kinerja pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan pertemuan yang diadakan setiap 6 (enam) bulan sekali adalah pertemuan yang melibatkan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan masalah yang dihadapi saat melakukan kegiatan pendampingan.

Selain mengadakan rapat kerja untuk membahas kinerja dan mengetahui hambatan yang ditemui mahasiswa. Untuk melakukan monitoring atau pengawasan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya juga membuat SATGAS (Satuan tugas) untuk mengetahui kegiatan pendampingan yang dilakukan kakak pendamping. SATGAS ini ditempatkan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

Selanjutnya adalah *fase publikasi*. Fase terakhir yang akan dilakukan oleh semua pihak. Dimana pihak dari UINSA melakukan pelaporan dalam bentuk *hard file* sebagai bukti pendampingan. Sedangkan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa.

Setelah, mengetahui hambatan yang disampaikan oleh mahasiswa dan mendapatkan informasi yang akurat dari SATGAS maka pihak Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan evaluasi dengan menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Pertama*, kewajiban melakukan pendampingan minimal hanya 1x (satu kali) dalam seminggu. Dengan pertimbangan bahwa kakak pendamping dapat melakukan kegiatan perkuliahan dan pendampingan dengan baik tanpa harus mengorbankan salah satu kegiatan yang ada. Penambahan dosen pendamping sebagai perwakilan kampus dengan pertimbangan bahwa rasio antara kakak pendamping tidak seimbang yaitu 1 : 37 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 rasio antara kakak pendamping dan dosen pendamping sebesar 1 : 20.

Adapun hasil rapat evaluasi dan monitoring juga membuat *schedule* mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan program *CSR selanjutnya*. Dalam rapat tersebut ditetapkan waktu dan kegiatan tersebut.⁶⁴

⁶⁴ Dokumentasi Hasil Rapat antara Dosen Pendamping dan Kakak Pendamping UINSA

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Pendataan	Desember 2019
2.	Sosialisasi Program	Februari 2020
3.	Pendaftaran atau <i>open recruitment</i> calon mahasiswa pendamping	Februari 2020
4.	Pengiriman data mahasiswa pendamping	Maret 2020
5.	Pemasangan data	Maret 2020
6.	<i>Gathering</i>	Maret 2020
7.	Bimbingan teknis	April 2020
8.	Proses pendampingan dan evaluasi bulanan	April-Maret 2021
9.	Proses Mentoring dan evaluasi akhir	November 2020
10	<i>Youth Competition</i>	Desember 2020

Tabel 5.1 : Tahapan dan Jadwal Kegiatan CSR Tahun 2020

2. Strategi Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility* dalam Bidang Pendidikan di Kota Surabaya

Dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif pada Program *Campus Social Responsibility* tentunya membutuhkan strategi yang baik dalam mewujudkan tujuan pendampingan utamanya dalam bidang pendidikan.

Adapun hal yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Surabaya yaitu :

a. Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan organisasi yang memungkinkan individu untuk mewujudkan kinerja kolektif. mekanisme koordinasi adalah “elemen paling mendasar dari struktur organisasi tersebut”. Dalam organisasi mencakup unsur-unsur formal. Dalam literatur, pengaturan organisasi ini sering melibatkan alat, teknologi, atau interaksi yang menyatukan unsur-unsur yang saling bergantung.⁶⁵

Dalam hal ini struktur mendasar dari kedua belah pihak yang melibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA adalah mahasiswa yang berperan sebagai kakak pendamping dan menjalankan aktivitas pendampingan kepada adik asuh.

Pada hasil wawancara bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Surabaya untuk koordinasi dilakukan melalui cara :

“Proses koordinasi ini ada yang dilakukan antara lingkup internal dan eksternal. Kemudian melibatkan antara mahasiswa pendamping, pihak dinsos dan dosen pendamping itu sendiri. Nah, bagaimana pelaksanaan koordinasinya?. Untuk pihak dosen pendamping bersama dinsos sendiri dilakukan setiap bulan sekali. Dimana pada hasil pertemuan tersebut membahas mengenai kinerja mahasiswa dalam proses pendampingan. Namun, apabila dosen

⁶⁵ Ibid , *Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan* hal. 23

pendamping tidak dapat hadir, maka kami akan melakukan pendekatan secara pribadi untuk mendapatkan informasi. Kemudian untuk mahasiswa dalam proses koordinasi dapat menggunakan media google form yang bertujuan untuk memudahkan dalam hal pelaporan pendampingan⁶⁶

Maka, untuk proses ini dapat disimpulkan bahwa Koordinasi dilakukan dengan cara formal atau informal. Misalnya, koordinasi secara formal adalah dengan mengadakan rapat kerja rutin antara pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui dosen pendamping *Campus Social Responsibility* dan kakak pendamping. Koordinasi antara pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan kakak pendamping selain melalui rapat formal juga memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya dengan menggunakan *Google Form* dengan link untuk mengisi data profil kakak pendamping dan adik asuh yang dapat diakses melalui URL [https:// s.id/4PkbO](https://s.id/4PkbO) .

Sedangkan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pendampingan. Kakak pendamping wajib untuk menyertakan laporan pendampingan dengan mengisi *google form* yang telah dibuat oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Adapun data laporan yang harus diisi oleh kakak pendamping melalui link <bit.ly/laporanpendampingancsr> yaitu :

- 1) Nama kakak pendamping
- 2) NIK (Nomor Induk Kependudukan)

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020

- 3) Kampus atau perguruan tinggi
- 4) Kegiatan pendampingan
- 5) Lokasi kegiatan
- 6) Waktu kegiatan
- 7) Tanggal kegiatan
- 8) Uraian kegiatan
- 9) Identifikasi masalah adik asuh
- 10) Uraian masalah
- 11) Upload foto kegiatan

Google Form dipilih sebagai media untuk melakukan koordinasi dengan mempertimbangkan beberapa hal. Dimana alasan utamanya adalah efektif dan efisien. Jauhnya jarak antara kampus dan kantor Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan upaya untuk meminimalisir biaya akomodasi dan biaya cetak laporan berupa *hard file* yang akan dibebankan oleh kakak pendamping. Kemudahan yang ditawarkan dengan menggunakan *google form* adalah data yang telah diisi oleh kakak pendamping dapat di *publish* ke laman web atau share ke akun media sosial dan tentunya fasilitas *Spread Sheat* yang ditampilkan sangat memudahkan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendampingan yang telah dilakukan.

b. Integrasi

Integrasi merupakan usaha yang bertujuan untuk menyatukan tindakan-tindakan dari berbagai pihak untuk mendapatkan kesepakatan dan langkah yang terarah. Dalam hal ini output yang dihasilkan dalam kesepakatan tersebut ialah SOP (*Standar Operating Procedure*).⁶⁷

Pada hal pendampingan yang dilakukan secara bersama, narasumber dalam hal ini adalah mahasiswa pendamping bernama Tania (Mahasiswa UINSA Fakultas Dakwah dan Komunikasi) menyatakan bahwa :

“Proses pendampingan yang dilakukan tidak lepas dari *control* dari dosen pendamping dan kemudahan oleh pihak dinsos. Setiap beberapa bulan sekali ada materi penanganan dan juga fasilitas untuk berkonsultasi mengenai progress dari adik asuh.”⁶⁸

Pernyataan tersebut juga turut serta disampaikan pada hasil wawancara bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa :

“ Dinsos tidak mengatur dan intervensi bagaimana proses pemecahan masalah dalam pendampingan. Artinya, upaya kakak pendamping dan dospem diberikan petunjuk atau guidance terkait pelaksana tetapi juga memebrikan

⁶⁷ Ibid , *Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan* hal. 24

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Tania selaku Mahasiswa pendamping dari UINSA, hari Sabtu , 22 Februari 2020

kesempatan untuk melakukan kreativitas. Dinsos hanya sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah.’’⁶⁹

Maka kesimpulan dari hasil wawancara dari kedua narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keikutsertaan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dalam proses pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan adik asuh terlihat pada alur pendampingan. Dimana salah satunya adalah proses pemecahan masalah dengan melibatkan pihak reveral. Pihak reveral disini adalah pihak luar selain Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA yang berasal dari sektor dinas lain seperti dinas pendidikan, kependudukan dan capil, ketenagakerjaan serta kesehatan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam *Guidance Book* pelaksanaan program CSR adalah proses pendampingan. Sebab, dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh kakak pendamping sangat beragam. Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai *conceptor* juga ikut serta mewujudkan tujuan pendampingan untuk menekan angka anak putus sekolah sesuai yang termaktub dalam *SOP Campus Sosial Responsibility*.

Contohnya penyelesaian masalah adik bimbing terkait kelengkapan administrasi adik asuh. Untuk terdaftar sebagai penerima dana BOS

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020

(Bantuan Operasional Sekolah) maka kelengkapan administrasi kependudukan adik asuh harus terlengkap. Maka, untuk mengupayakan adik asuh tetap bersekolah dan mendapatkan bantuan biaya sekolah Dinas Sosial Kota Surabaya memberikan surat kuasa pada kakak pendamping untuk melengkapi administrasi adik asuh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

c. Sinkronisasi

Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyesuaikan segala bentuk aktivitas sehingga memperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas. Dengan spesialisasi kerja atau fungsi akan memberikan petunjuk apakah pekerjaan telah terlaksana dengan baik atau tidak. Adanya sinkronisasi akan meminimalisir pekerjaan ganda. Artinya, pekerjaan tidak akan tumpang tindih serta pihak yang bersangkutan tidak akan mengalami kesesatan dalam bertindak.⁷⁰

Dalam hal ini dapat dilihat melalui bagan struktur pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* yang disusun secara integratif dengan melibatkan kedua belah pihak yaitu Pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan perguruan tinggi. Artinya, koordinasi akan hanya

⁷⁰ Ibid, hal. 24

memiliki satu komando dalam pelaksanaan pendampingan meskipun melibatkan dua belah pihak.

Proses sinkronisasi juga bertujuan untuk menyesuaikan aspek-aspek teknis antar pihak. Proses penyesuaian ini seperti menyamakan waktu dan data. Hal ini dapat dilihat dengan pemanfaatan teknologi menggunakan aplikasi *GPS Map Camera*. Penggunaan aplikasi tersebut dalam dokumentasi laporan kegiatan memudahkan tim verifikasi dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mengetahui waktu dan tempat dimana kegiatan pendampingan berlangsung.

Selain itu Untuk melakukan monitoring atau pengawasan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya juga membuat SATGAS (Satuan tugas) untuk mengetahui kegiatan pendampingan yang dilakukan kakak pendamping. SATGAS ini ditempatkan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Proses monitoring tersebut dilakukan dengan sistem *door to door* atau kunjungan ke rumah adik asuh untuk memastikan mengenai kinerja pendampingan dari kakak pendamping.

d. Simplifikasi

Simplifikasi merupakan usaha untuk menerapkan kegiatan yang teratur. Simplifikasi menemukan jawaban mengenai cara-cara yang paling baik untuk digunakan dalam pekerjaan. Untuk mendapatkan jawaban tersebut maka perlu membuat program-program yang *realistic* dan sederhana untuk dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat

disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional.⁷¹

Dalam pelaksanaannya, strategi dalam hal simplifikasi dapat dilihat dengan adanya pengembangan dari proses evaluasi dari tahun ke tahun. Menjelang tahun pendampingan baru, kedua belah pihak melakukan pertemuan dengan menyusun rencana berupa jadwal-jadwal yang akan diterapkan secara bersama.

Adapun jadwal yang disusun ini merupakan deadline pelaksanaan tahapan kegiatan seperti pendataan, sosialisasi program, pendaftaran atau *open recruitment* calon mahasiswa pendamping, pemasangan data, gathering, bimbingan teknis, Proses pendampingan dan evaluasi bulanan, Proses Mentoring dan evaluasi akhir, *Youth Competition*. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendampingan dapat berjalan secara efektif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif antara Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*

Dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui Program *Campus Sosial Responsibility* tentunya mengalami pasang surut

⁷¹ Ibid, hal. 25

keefektifan pendampingan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan manajemen kolaboratif yang melibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA dalam Program *Campus Social Responsibility* tidak terlepas dari peran sumber daya yang ada. Mahasiswa UINSA sebagai kakak pendamping melakukan pendampingan didukung dengan letak UINSA sebagai kampus yang strategis. Sehingga, kakak pendamping dapat melakukan pendampingan kepada adik asuh tanpa ada kendala jarak.

Adapun faktor pendukung dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan pihak yang terlibat dalam manajemen kolaboratif pada Program *Campus Social Responsibility* :

2) Pihak Dinas Sosial Kota Surabaya

Melalui hasil wawancara bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan kerjasama ini. Hal yang paling memudahkan kami adalah proses pelaporan dimana kakak pendamping melakukan pelaporan melalui form. Nah, setelah mereka mengisi form tersebut maka, kami dapat melihat bagaimana perkembangan pendampingan. Kemudian pembentukan SATGAS ini juga akan turun langsung ke

lapangan untuk mendapatkan informasi pendampingan. Jadi, tidak hanya dari mahasiswa nya saja”⁷².

Maka, kesimpulan mengenai faktor pendukung dari pihak Dinas Sosial dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Penggunaan *Google Form* dan *Maps Camera* sebagai media koordinasi dan simplifikasi adalah inisiatif yang tepat untuk mengefesiansikan waktu, biaya dan tenaga
 - b) Pembentukan SATGAS untuk setiap kecamatan adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan informasi pendampingan melalui sistem *door to door* di rumah adik asuh. Jadi informasi tidak hanya didapatkan secara sepihak atau melalui kakak pendamping saja.
- 3) Pihak UINSA Surabaya

Untuk mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dari pihak UINSA Surabaya. Maka, peneliti melakukan wawancara bersama dua narasumber yaitu kakak pendamping. Hasil wawancara bersama kakak pendamping bernama Tania menyatakan bahwa :

“ Dalam pendampingan, kami diberikan kebebasan untuk melakukan pendampingan kepada adik asuh. Cara atau pendekatan yang kami lakukan selama masih sesuai dengan

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020

guidance book tidak dipermasalahkan oleh Dinsos. Sebab, setiap adik asuh memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dinsos pun, dalam hal ini juga sangat responsive terhadap permasalahan adik bimbing.”⁷³

Maka, hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kecepatan merespons kendala yang dialami oleh kakak pendamping juga sangat mendukung berjalannya proses pendampingan. Dimana pihak Dinas Sosial Kota Surabaya juga ikut serta dalam penyelesaian masalah adik asuh. Namun selain itu, pihak Dinas Sosial juga memberikan kewenangan mengenai teknik yang digunakan kakak pendamping dalam proses pendampingan. Sehingga, proses pendampingan yang dilakukan oleh kakak pendamping dapat menyesuaikan permasalahan dengan keadaan adik asuh.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini hal yang menjadi faktor penghambat dibedakan menjadi dua yaitu dari pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA:

⁷³ Hasil wawancara dengan Tania selaku Mahasiswa atau Kakak Pendamping CSR UINSA, hari Sabtu 22 Februari 2020

1) Pihak Dinas Sosial Kota Surabaya

Hasil wawancara kami bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan bahwa:

“Untuk faktor penghambat ini, sebenarnya terletak pada ketidakhadiran dosen pendamping pada saat rapat bulan membahas mengenai kinerja mahasiswa terhadap pendampingan yang dilakukan kepada adik asuh. Selain itu, dosen pendamping masih banyak yang tidak mengetahui tugasnya sebagai perwakilan kampus dalam program ini”

Maka, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk agenda rapat rutin yang dilakukan secara rutin. Masih ditemuinya perwakilan kampus dalam hal ini dosen pendamping atau pembina tidak hadir untuk melaporkan kinerja mahasiswa.

2) Pihak UINSA Surabaya

Untuk menemukan jawaban mengenai faktor penghambat yang dialami oleh pihak UINSA Surabaya dalam manajemen kolaboratif pada program *Campus Social Responsibility*. Peneliti melakukan wawancara bersama dosen pendamping atau pembina dan kakak pendamping. Wawancara bersama dosen pendamping menyatakan bahwa :

“Faktor penghambat sampai saat ini terletak pada jumlah dosen pendamping yang tidak sesuai dengan jumlah kakak atau mahasiswa pendamping yang semakin tahun

bertambah. Untuk tahun kemarin hanya ada 1 (satu) dosen pendamping saja. Yang seharusnya, 1 (satu) dosen pendamping menaungi 10 (sepuluh) mahasiswa.’’⁷⁴

Hasil wawancara bersama kakak pendamping :

‘‘Sosialisasi mengenai penganan kepada adik asuh dilakukan secara berkala. Jadi tidak dalam satu waktu. Kami terkadang melakukan langkah atau inisiatif sendiri.’’⁷⁵

Maka, kesimpulan mengenai faktor penghambat yang dialami oleh pihak UINSA Surabaya yaitu :

- a) Rasio dosen pendamping dan kakak pendamping tidak seimbang. Idealnya, dosen pendamping dan kakak pendamping adalah 1 : 10 yang artinya 1 (satu) dosen pendamping mendampingi 10 (sepuluh) kakak pendamping. Sebab UINSA sebagai salah satu kampus dengan jumlah kakak damping terbanyak memerlukan fasilitas dengan jumlah dosen pendamping yang sesuai.
- b) Sosialisasi yang dilakukan secara berkala, menyulitkan kakak pendamping untuk mengambil tindakan pendampingan terhadap adik asuh.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Agus Rosid, S.ST selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya, hari Jumat, 21 Februari 2020

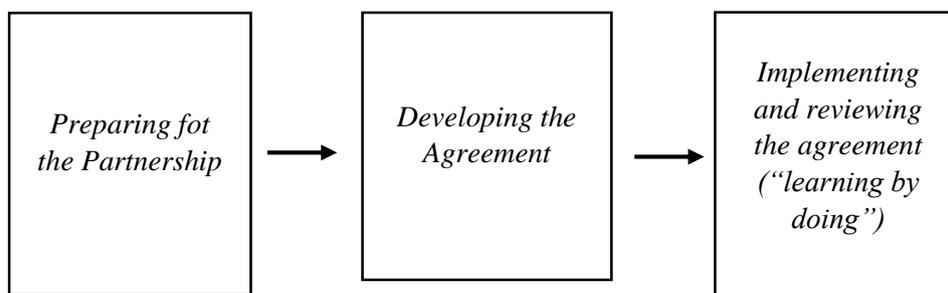
⁷⁵ Hasil wawancara dengan Tania selaku Mahaiswa Pendamping UINSA hari Jumat, 21 Februari 2020

C. Analisis Hasil Penelitian

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen secara sistematis. Analisis data yang akan dilakukan ialah mengenai pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Surabaya dalam Program *Campus Sosial Responsibility*, Strategi manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Surabaya dalam Program *Campus Sosial Responsibility* dan faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya UINSA Surabaya dalam Program *Campus Sosial Responsibility*

1. Analisis Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*.

Dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif tentunya terdapat proses atau langkah-langkah yang menjadi alur bagaimana pelaksanaan antara kedua belah pihak melakukan proses manajemen. Langkah-langkah pelaksanaan manajemen kolaboratif dapat dilihat sebagai berikut :⁷⁶



⁷⁶ Grazia Borrini-Feyerabend. *Collaborative Management of Procted Areas: Tailoring The Approach to The Context*. (Switzerland : IUCN The World Coversation Union 1996), hal.36

Bagan 3: Langkah-langkah pelaksanaan manajemen kolaboratif

Langkah pertama yaitu *Preparing for The Partnership* atau menyiapkan mitra. Dalam hal ini langkah-langkah penerapan manajemen kolaboratif yaitu mempersiapkan kemitraan yang dilakukan antara Dinas Sosial Kota Surabaya adalah dengan melakukan *need assement* serta survey kepada beberapa perguruan tinggi termasuk UINSA Surabaya. Dalam hal ini alasan untuk melakukan manajemen kolaboratif bersama UINSA Surabaya adalah dengan memperhatikan akses sumber daya yang tersedia dari pihak lain, mengidentifikasi pemangku awal kepentingan utama, meninjau penggunaan lahan dan sumber daya serta konflik yang ada, menilai kebutuhan dan kelayakan mengembangkan perjanjian manajemen kolaboratif, memulai pemangku kepentingan, melaksanakan latihan penilaian partisipatif dan melanjutkan analisis pemangku kepentingan dengan cara partisipatif, yang sesuai. Jika perlu, dukung pemangku kepentingan untuk mengorganisasi, mengidentifikasi perwakilan dan mengembangkan dalam konsensus internal tentang kepentingan dan kepedulian mereka terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan dari Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu :

- a) UINSA dinilai sebagai perguruan tinggi yang menjadi pionir dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility*. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya UINSA sejak awal pelaksanaan program pada tahun 2014.
- b) UINSA memiliki empati terhadap penanganan masalah anak penyandang penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan keaktifan yang ditunjukkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- c) UINSA merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam yang tergabung dalam program *Campus Social Responsibility* dimana diharapkan mampu melakukan pendampingan kepada adik asuh dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dengan tujuan mengubah pola pikir dan tingkah laku adik asuh. Sehingga mampu mencapai tujuan pendampingan.
- d) Potensi mahasiswa UINSA dalam mengikuti program *Campus Social Responsibility* sangat besar. Berasal dari latar belakang program studi yang bervariasi dan juga jumlah mahasiswa sebagai pendaftar selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 37 mahasiswa sebagai kakak pendamping yang berhasil lolos dalam seleksi internal kampus dan pada tahun 2020 sebanyak 42 mahasiswa sebagai kakak pendamping.
- e) Lokasi UINSA dinilai sangat strategis dengan wilayah yang menjadi mayoritas tempat tinggal adik bimbing.

Selanjutnya *Developing the Agreement* adalah mengembangkan perjanjian dengan menunjuk fasilitator independen seperti: Mengadakan

pertemuan "prosedural" pertama di antara para pemangku kepentingan, mendukung negosiasi, mediasi, atau arbitrase konflik sesuai kebutuhan, Mencapai konsensus dasar dan / atau visi bersama kesepakatan (mis. Nota kesepahaman atau rencana manajemen) dengan menyebutkan pengaturan zonasi dan fungsi-fungsi spesifik, hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan, yang sesuai, Publikasikan konsensus atau perjanjian, adakan upacara untuk menggarisbawahi pentingnya kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam praktiknya, telah diketahui bahwa adanya *Momerandum of Undersatand* yang telah disetujui oleh masing-masing instansi yaitu Drs. Supomo, M.M dan Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, M.A, Ph.D pada tanggal 23 Agustus 2019. Dalam MoU tersebut terdapat penjabaran mengenai

- a. Maksud dan tujuan
- b. Obyek dan ruang lingkup
- c. Hak dan kewajiban
- d. Pembiayaan,
- e. Jangka waktu kerjasama
- f. Kerahasiaan
- g. Berakhirnya perjanjian
- h. Keadaan Kahar
- i. Penyelesaian perselisihan
- j. *Addendum*

k. Korespondensi

Langkah terakhir yaitu *Implementing and reviewing the agreement (learning by doing)* menerapkan dan meninjau perjanjian atau dikenal dengan istilah belajar sambil melakukan yang ditandai dengan pelaksanaan kegiatan manajemen yang sesuai kebutuhan, memperjelas tanggung jawab dan hak-hak pemangku kepentingan, mengelola konflik dan menegakkan perjanjian, melakukan pemantauan kegiatan dan hasil (yang diharapkan dan tidak terduga) berdasarkan tujuan atau bereksperimen dengan kegiatan teknis yang lebih kompleks atas dasar visi, kesepakatan dan hasil pemantauan, lakukan tinjauan berkala dengan semua pemangku kepentingan terkait. Jika perlu, lakukan perubahan yang diperlukan dan / atau kembali untuk mengembangkan perjanjian baru.

Selain MoU bentuk kesepakatan lainnya adalah SOP (*Standar Operating Procedure*) sebagai bentuk pengembangan perjanjian antara kedua belah pihak yang mengatur bagaimana procedural pendampingan yang dilakukan oleh kakak pendamping. Selain itu, dibentuknya SATGAS (Satuan Tugas) untuk melakukan *controlling* terhadap pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa selaku kakak pendamping.

2. Analisis Strategi Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility* dalam Bidang Pendidikan di Kota Surabaya

Menurut Johnson et.al dalam Dahlan mengatakan bahwa ada 4 (empat) prinsip manajemen kolaborasi menuju kondisi ideal yaitu:⁷⁷

a. Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan organisasi yang memungkinkan individu untuk mewujudkan kinerja kolektif. mekanisme koordinasi adalah “elemen paling mendasar dari struktur organisasi tersebut”. Dalam organisasi mencakup unsur-unsur formal. Dalam literatur, pengaturan organisasi ini sering melibatkan alat, teknologi, atau interaksi yang menyatukan unsur-unsur yang saling bergantung.

Dalam praktiknya, strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui Program *Campus Social Responsibility* ialah melakukan koordinasi secara formal dan informal. Koordinasi ini juga dilakukan dengan melibatkan masing-masing pihak dan tidak terkecuali mahasiswa sebagai kakak pendamping. Adapun salah satu keunikan dari strategi yang digunakan untuk memudahkan koordinasi adalah dengan memanfaatkan *goggle form*. Hal tersebut dipilih agar

⁷⁷ Johnson, Richard A., Kast, Fremont dan James E. Rosenzweig. *Organization and Management (Organisasi & Manajemen)* dalam *Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*, Dahlan dan Muh.Darwis, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, 4, no.1, 2017 hal. 23 diakses 9 Desember 2019 pada <https://ojs.unm.ac.id/index.php/administrare/article/view/3445>.

tidak membebani waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh kakak pendamping sebagai bentuk laporan pendampingan.

b. Integrasi.

Integrasi merupakan usaha yang bertujuan untuk menyatukan tindakan-tindakan dari berbagai pihak untuk mendapatkan kesepakatan dan langkah yang terarah. Dalam hal ini output yang dihasilkan dalam kesepakatan tersebut ialah SOP (*Standar Operating Procedure*).

Bentuk integrasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Surabaya adalah penyelesaian masalah adik asuh. Mahasiswa sebagai kakak pendamping sekaligus aktor utama dalam proses pendampingan diberikan kemudahan untuk berkonsultasi kepada dosen pendamping maupun pihak Dinas Sosial Kota Surabaya.

c. Sinkronisasi.

Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyesuaikan segala bentuk aktivitas sehingga memperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas. Dengan spesialisasi kerja atau fungsi akan memberikan petunjuk apakah pekerjaan telah terlaksana dengan baik atau tidak. Adanya sinkronisasi akan meminimalisir pekerjaan ganda. Artinya, pekerjaan tidak akan tumpang tindih serta pihak

yang bersangkutan tidak akan mengalami kesesatan dalam bertindak.

Salah satu tujuan dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh kakak pendamping ialah memastikan bahwa adik asuh tetap mengenyam pendidikan. Tentunya, dalam pelaksanaannya tidak mudah. Maka perlu adanya sebuah program yang memacu kakak pendamping untuk melakukan yang terbaik dari setiap kegiatan pendampingan.

Strategi manajemen kolaboratif pada poin sinkronisasi dapat diketahui melalui adanya program yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam program *Campus Sosial Responsibility* melalui program *Youth Competition*. *Youth Competition* merupakan ajang kompetisi yang diikuti oleh semua kakak pendamping dari perguruan tinggi di Kota Surabaya. Selain itu, dibentuknya SATGAS (Satuan tugas) yang memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh kakak pendamping. SATGAS yang melakukan survey lapangan bekerja secara random artinya tidak ada waktu yang paten untuk melakukan survey serta pelaksanaan survey tidak diketahui oleh kakak pendamping. Hal ini bertujuan agar respon adik asuh dan keluarga terlepas dari intervensi kakak pendamping.

d. Simplifikasi.

Simplifikasi merupakan usaha untuk menerapkan kegiatan yang teratur. Simplifikasi menemukan jawaban mengenai cara-cara yang paling baik untuk digunakan dalam pekerjaan. Untuk mendapatkan jawaban tersebut maka perlu membuat program-program yang *realistic* dan sederhana untuk dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional.

Dalam pelaksanaannya, strategi dalam hal simplifikasi dapat dilihat dengan adanya pengembangan dari proses evaluasi dari tahun ke tahun. Kedua belah pihak menyusun jadwal yang berfungsi sebagai deadline pelaksanaan tahapan kegiatan seperti pendataan, sosialisasi program, pendaftaran atau *open recruitment* calon mahasiswa pendamping, pemasangan data, *gathering*, bimbingan teknis, Proses pendampingan dan evaluasi bulanan, Proses Mentoring dan evaluasi akhir, *Youth Competition*. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendampingan dapat berjalan secara efektif dan progresif.

3. Analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility*

Dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui Program Campus Social Responsibility tentunya mengalami pasang surut

keefektifan pendampingan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dialami oleh kedua belah pihak yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA Surabaya, dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

No.	Dinas Sosial Kota Surabaya	UINSA Surabaya
1.	Penggunaan <i>Google Form</i> dan <i>Maps Camera</i> sebagai media koordinasi dan simplifikasi adalah inisiatif yang tepat untuk mengefesiensikan waktu, biaya dan tenaga	Kecepatan merespons kendala yang dialami oleh kakak pendamping juga sangat mendukung berjalannya proses pendampingan.
2.	Pembentukan SATGAS untuk setiap kecamatan adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan informasi pendampingan melalui sistem <i>door to door</i> di rumah adik asuh.	

	Jadi informasi tidak hanya didapatkan secara sepihak atau melalui kakak pendamping saja	
--	---	--

Tabel 6.1. Faktor Pendukung

b. Faktor Penghambat

No.	Dinas Sosial Kota Surabaya	UINSA Surabaya
1.	Ketidakhadiran Dosen pendamping dalam rapat bulanan mengenai kinerja mahasiswa.	Rasio dosen pendamping dan kakak pendamping tidak seimbang. Idealnya, dosen pendamping dan kakak pendamping adalah 1 : 10 yang artinya 1 (satu) dosen pendamping mendampingi 10 (sepuluh) kakak pendamping. Sebab UINSA sebagai salah satu kampus dengan jumlah kakak pendamping terbanyak memerlukan fasilitas dengan

		jumlah dosen pendamping yang sesuai.
		Sosialisasi yang dilakukan secara berkala, menyulitkan kakak pendamping untuk mengambil tindakan pendampingan terhadap adik asuh.

Tabel 6.2 Faktor Penghambat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen kolaboratif adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan PMKS pada anak di Kota Surabaya. Manajemen kolaboratif (*co-management* atau *collaborative management*), sering disebut sebagai *participatory management*, *shared management*, *multi-stakeholder management* adalah bentuk pengelolaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan mekanisme kerjasama, yang didorong oleh pengakuan hak pada setiap pihak, dalam rangka mencapai tujuan manajemen, secara bersama. Dalam bidang pendidikan, kota Surabaya hadir sebagai kota yang responsif terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh anak melalui program CSR (*Campus Social Responsibility*). CSR ialah kegiatan yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dan bekerjasama dengan perguruan tinggi salah satunya adalah UINSA melalui mahasiswanya untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada anak putus sekolah dan rentan putus sekolah dimana satu orang mahasiswa diberikan tugas untuk mendampingi satu orang adik asuh.

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan dalam bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program

Campus Social Responsibility. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1): pelaksanaan manajemen kolaboratif melalui langkah-langkah meliputi : a) *preparing for the partnership* dengan melakukan observasi untuk menemukan mitra kerja, b) *developing the agreement* atau mengembangkan perjanjian yang dimulai dari membuat MoU dan SOP sebagai upaya tindak lanjut , c). *Implementing and reviewing the agreement* atau meninjau perjanjian dengan pembentukan SATGAS untuk mengevaluasi kinerja pendampingan. (2) strategi manajemen kolaboratif melalui program *Campus Social Responsibility* yaitu : a) koordinasi dengan menggunakan *google form*, b) proses integrasi dengan berpedoman pada MoU dan SOP untuk menghindari *double job*, c) sinkronisasi, menggunakan *google form* dan pembentukan SATGAS, d) simplifikasi, dengan membuat *schedule of event*. (3) faktor-faktor pendukung: 1) pemilihan mitra kerja yang tepat, b). penggunaan teknologi, c) pembentukan SATGAS mempermudah proses pendampingan. 4) Faktu penghambat: Rasio antara dosen pendamping dan mahasiswa tidak relevan.

B. Saran

Akhir dari penulisan skripsi ini adalah peneliti memberikan beberapa saran dalam pelaksanaan manajemen kolaboratif Dinas Sosial Kota Surabaya dan UINSA melalui Program *Campus Social Responsibility* yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya mampu memberikan pola sosialisasi yang lebih baik dalam masalah penanganan adik asuh. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala ternyata menyulitkan mahasiswa pendamping untuk melakukan penanganan kepada adik asuh. Sosialisasi mengenai penanganan ini dapat dilakukan dalam satu waktu agar mahasiswa mampu memahami perannya sebagai pendamping.
2. Pihak UINSA Surabaya dapat menambahkan jumlah dosen pendamping. Mengingat potensi dan jumlah mahasiswa yang mengikuti program *Campus Social Responsibility* meningkat setiap tahunnya.
3. Untuk para peneliti agar melakukan penelitian lebih lanjut yang mampu mengungkap lebih dalam mengenai manajemen kolaboratif pendidikan melalui program pendidikan lainnya yang dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Adi W. Gunawan,. 2006. *Genius Learning Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Borrini Grazia -Feyerabend.1996. *Collaborative Management of Procted Areas: Tailoring The Approach to The Context*. (Switzerland : IUCN The World Coversation Union 1996)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 1997. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Crowther David & Aras Güler, "Corporate Social Responsibility", (____:Ventus Publishing Aps)
- Effendi Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Depok: Raja Grafindo
- Galbreath.Jeremy, __ “*The Benefits of Corporate Social Responsibility: An Empirical Study*”. Jeremy Galbreath, *Graduate School of Business, Curtin University of Technology Perth, Australia*.
- Johnson, Richard A., Kast, Fremont and James E. Rosenzweig. 2002. *Organization and Management (Organisasi & Manajemen) Jilid 1*. Terjemahan A. Hasymi Ali, Bumi Aksara, Jakarta

- Moleong J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PTRemaja Rosdakarya
- M. bukhari, dkk. 2005. *Azaz –Azaz Manajemen*.Yogyakarta : Aditya Media
- O’flynn and Wanna, 2008. *Collaborative Governance: A New Era Public Policy In Australia?*. ANU-E Press The Autsralian National University
- Outi Kanste et al. 2016. *The Collaboration Management and Employee Views of Work and Skills in Services for Children and Families in Finish Municipalities*”, *Nordic Journal of Working Life Studies*
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Maimunah Ismail. 2009, “*Corporate Social Responsibility And Its Role In Community Development: An International Perspective*”, *Uluslararası Sosyal Aratirmalar Dergisi The Journal of International Social Research. 2*
- Nawawi Hadari.1984. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta:Gunung Agung
- Rosady Ruslan. 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sabaruddin Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Layanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Sukarna. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung ; Rajawali Pres
- Sule T. Erni. dan Kurniawan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta:Kencana Prenada Grup

Stephen P. Robbins and Mary Coulter. 2012. *Management Eleven Edition*, New Jersey: United States of America

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Syaodih Nana. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Terry R. George dan Rue W. Leslie.1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara

